

PAMERAN

-1 JAN 2004



LAPORAN PENELITIAN
STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

**PENGARUH SOSIALISASI GENDER PADA WANITA KELAS
MENENGAH TERHADAP KESADARAN POLITIK**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Peneliti :

Dra. DWI WIDYASTUTI BUDI H., M.A.
Drs. BINTORO WARDIYANTO, M.Si.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan
DIP Nomor : 019/XXIII/3/--/1999 Tanggal 1 Juni 1999
Kontrak Nomor : 022/ P2 IPT/DPPM/99/SKW/1999
Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdikbud
Nomor Urut : 06

**PUSAT PENELITIAN / STUDI WANITA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Januari, 2000

3000076013141

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

WOMEN IN POLITICS



LAPORAN PENELITIAN
STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB
KK-2B
305.433 2
Hen
P

PENGARUH SOSIALISASI GENDER PADA WANITA KELAS MENENGAH TERHADAP KESADARAN POLITIK



Peneliti :

Dra. DWI WIDYASTUTI BUDI H., M.A.
Drs. BINTORO WARDIYANTO, M.Si.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan
DIP Nomor : 019 /XXIII/3/--/1999 Tanggal 1 Juni 1999
Kontrak Nomor : 022/ P2 IPT/DPPM/99/SKW/1999
Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdikbud
Nomor Urut : 06

3000 076 013141

PUSAT PENELITIAN / STUDI WANITA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Januari, 2000

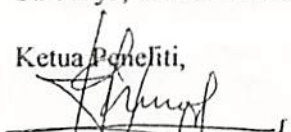
**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1.a.Judul Penelitian	: Pengaruh Sosialisasi Gender Pada Kelas Menengah Terhadap Kesadaran Politik
b.Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Dasar <input type="checkbox"/> Terapan <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan
c.Kategori	: <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2.Kepala Proyek Penelitian	
a>Nama Lengkap Dan Gelar	: Dra Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, MA.
b.Jenis Kelamin	: Perempuan
c.Pangkat/Gol dan NIP	: Penata /III C/ 131 801 643
d.Jabatan Fungsional	: Lektor
e.Fakultas/Jurusan/Puslit	: Pusat Penelitian Studi Wanita
f.Univ/Inst/Akademi	: Universitas Airlangga
g.Bidang Ilmu Yang Diteliti	: Wanita Dan Politik
3.Jumlah Tim Peneliti	: 2 orang
4.Lokasi Penelitian	: Kodya Surabaya
5.Bila Penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan ,sebutkan:	
a>Nama Instansi	: -
b.Alamat	: -
6.Jangka Waktu Penelitian	: 6 bulan
7.Biaya yang Diperlukan	: Rp.4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
8.Seminar Hasil Penelitian	
a.Dilaksanakan Tanggal	: 24 Februari 2000
b.Hasil Penilaian	: <input type="checkbox"/> Baik sekali <input checked="" type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang

Mengetahui :
Ketua Puslit/Studi Wanita

Dra Ety Susanti, MA.

Surabaya, 24 Februari 2000

Ketua Peneliti,

Dra Dwi Windyastuti, MA.
NIP.131 801 643

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian Unair

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini
NIP.130 355 372

RINGKASAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Pengaruh Sosialisasi Gender Pada Wanita Kelas Menengah Terhadap Kesadaran Politik.
2. Ketua Peneliti : Dwi Windyastuti Budi Hendrarti
3. Anggota Peneliti : Bintoro Wardiyanto
4. Dana Penelitian : Proyek Pengkajian Dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan-DP3M Nomor.022/P2IPT/SKW/VI/1999 Tanggal 1 Juni 1999.

Persoalan gender menjadi sangat penting dan memunculkan persoalan tersendiri ketika terjadi transformasi sosial di dalam masyarakat. Seperti kita ketahui selama ini terdapat anggapan umum yang sangat kental di dalam masyarakat bahwa dunia bersifat tunggal -- yakni bahwa hanya ada satu dunia yakni dunia pria, khususnya di sektor publik. Pandangan ini terkikis oleh suatu kenyataan bahwa dewasa ini semakin banyak muncul fenomena baru dalam diri kaum perempuan. Secara kuantitas maupun kualitas kaum wanita mulai banyak terjun berkarir di sektor publik.

Secara mendasar kemunculan kesadaran perempuan akan perannya di dunia publik-politik dipicu erosi sebuah mitos tunggal tentang dunia (politik) perempuan adalah inferior, subordinasi. Hegemoni kekuasaan yang dibangun kaum pria dengan mengabaikan seksualitas lain menjadikan kehidupan politik demikian seksis. Implikasi dari mitos dunia tunggal tersebut pada marginalisasi kaum wanita, khususnya di dalam perjuangan mencari kekuasaan.

Penanaman nilai, norma dan budaya seksis tersebut telah berlangsung berabad-abad lamanya, baik pada strata masyarakat atas, menengah maupun ke bawah. Sekolah, keluarga, media massa, teman sekerja, sebagai media yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk ideologi gender kepada masyarakat.

Berpijak dari pemikiran tersebut maka ada beberapa hal yang akan dipersoalkan di dalam penelitian ini tentang pola sosialisasi gender pada perempuan kelas menengah perkotaan, agen-agen yang digunakan untuk mensosialisasi peran gender bagi perempuan kelas menengah perkotaan, agen yang paling kuat membangun kesadaran gender pada perempuan kelas menengah perkotaan dan pengaruh sosialisasi gender

SUMMARY

Gender Socialization For The Middle-Class Women And Its Impact to Their Political Awareness
 (Dwi Widyastuti Budi H., Bintoro Wardiyanto; 1999, 57 Pages)

Gender differences revealed the patterns of sex roles behavior. We take the patterns of everybody life for granted, and they become part of the natural landscape that surrounds us in the social world.

Gender inequality can even be seen between men and women on the job position. As we observed, most position to be given to man than women, especially on "public sphere".

The lack of women awareness is caused by family socialization, that we usually introduced by the the value of womeness. We commonly understand that domestics tasks as a part of wemen roles. Consequently women's role is marginalized, when the women entering the other sphere. Even we find the feminization of certain official position. As a consequence women tend to avoid the political life because they think that the political life is "the men's bussiness". In this sense women are far from political world and they do not integrated with the political life. Socialization values, norms and culture are dominated by "male's bias".

Recognizing these problems, broadening of gender sensitiveness and awareness is the most essential task to eliminate gender differences. Hence the need of action research about "the gender meaning" for most women is necessary for gender development.

(Rest. Inst. The Center for Research on Womenhood Airlangga University; 022/P2IPT/SKW/VI/1999, June 1, 1999)

pada perempuan kelas menengah mampu membangun kesadaran politiknya.

Penelitian ini bersifat deskriptif sebab mencari sedalam-dalamnya bagaimana sosialisasi politik tentang peran gender yang berlangsung di kalangan kelas menengah perkotaan. Serta agen apakah yang paling kuat dalam proses sosialisasi gender yang mampu menumbuhkan kesadaran politik perempuan. Sedangkan populasi dalam penelitian ini ialah semua perempuan kelas menengah yang berstatus sudah menikah maupun belum menikah, yang bekerja di sektor publik formal, non formal dan bekerja. Sampel yang diambil 50 orang dengan alasan bahwa sampel bersifat homogen yakni wanita kelas menengah. Sample ditarik secara Purposive Sampling yakni hanya mereka yang masuk dalam kelas menengah. Sementara data akan dikumpulkan lewat wawancara dengan responden yang terpilih dalam penelitian. Disini peneliti akan menggunakan pedoman wawancara yang sifatnya semi terbuka. Data yang diperoleh baik data kuantitatif maupun kualitatif dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi yang kemudian diinterpretasi secara teoritik.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran domestik masih tetap dianggap sebagai peran yang dimainkan perempuan,. Namun kenyataannya domestikasi peran ini menjalar ke sektor publik seperti di lingkup kantor, organisasi sosial. Oleh perempuan peran domestik ini ditangkap sebagai "kodrat" perempuan yang tidak terhindarkan dalam kehidupannya.

Senyampang dengan domestikasi peran secara tidak disadari melahirkan feminisasi jabatan di kantor yang pada gilirannya menggeser peluang perempuan untuk mencapai jabatan-jabatan penting dalam pekerjaan di sektor formal.

Sosialisasi ketidakseimbangan gender baik yang dilakukan keluarga, sekolah, tempat kerja maupun organisasi sosial berimplikasi pada rendahnya pengetahuan, sikap dan tindakan politik kaum perempuan. Dalam konteks ini perempuan tetap masih terimbas oleh mitos bahwa dunia "publik politik" merupakan dunia pria, perempuan sekedar menjadikan wacana.

Berpijak dari temuan tersebut maka memperluas penyadaran gender kepada masyarakat (pria maupun perempuan) merupakan jawaban untuk menghapuskan ketidakseimbangan gender. Kaji tindak tentang "makna gender" bagi perempuan perlu dikembangkan dalam rangka untuk menentukan sebuah "treatment" yang sesuai dengan pemahaman kaum perempuan.

KATA PENGANTAR

Perguruan Tinggi sebagai basis pengembangan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat maka kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan merupakan tugas keilmuan. Tanggung jawab moral kepada masyarakat ataupun akademik untuk pengembangan khasanah keilmuan adalah sebagai sentral perhatian perguruan tinggi.

Demikian halnya penghapusan-penghapusan ketidaksamaan yang dirasakan oleh perempuan akibat kultur masyarakat yang berkembang merupakan sebuah kewajiban dan kebajikan lembaga-lembaga pengembangan ilmu.

Lewat pengkajian lebih mendalam sebab dan akibat ketidaksamaan perempuan tersebut akan dapat memberikan sebuah solusi yang bermanfaat khususnya bagi perempuan. Solusi tersebut paling tidak berdampak sangat luas kepada masyarakat.

Untuk itu peneliti mencoba mengkaji mengenai sosialisasi gender kepada perempuan kelas menengah perkotaan (Surabaya) dari sisi agensinya dan dampak dari sosialisasi tersebut terhadap kesadaran politik perempuan.

Akhirnya dengan berbagai upaya dan jerih payah, penelitian dapat terselesaikan, walaupun mungkin penelitian ini belum bisa tuntas menggali informasi yang paling dalam. Namun setidaknya upaya untuk secara bersungguh menyelesaikan penelitian sudah merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai. Untuk itu peneliti sangat berterima kasih atas bantuan dari segenap pihak yang membantu dalam penelitian ini, DIKTI, Lemlit Unair, responden, Asisten Lapangan—sehingga terselesaikannya laporan ini.

Di akhir kata semua kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak akan peneliti terima secara lapang dada, sebab bagaimanapun peneliti sangat menghargai sebuah perbedaan pendapat dalam rangka membangun kultur keilmuan.

Surabaya, Februari 1999
Peneliti

Dra.Dwi Windyastuti, MA
Drs.Bintoro Wardiyanto, MSi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Penelitian	i
Abstrac	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	iiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.Latar Belakang	1
2.Perumusan Masalah	4
3.Tujuan Penelitian	5
4.Manfaat Penelitian	5
5.Tinjauan Pustaka	
5.1.Sosialisasi Politik	6
5.2.Gender Dan Sosialisasi Politik	11
5.3.Kelas Menengah	18
6.Definisi Konsep	
6.1.Sosialisasi Gender	22
6.2.Kesadaran Politik	22
6.3.Kelas Menengah	22
BAB II METODE PENELITIAN	
1.Tipe Penelitian	23
2.Populasi Dan Sampel	23
3.Tehnik Pengambilan Sampel	23
4.Tehnik Pengumpulan Data	24
5.Jenis Data Dan Data Yang Dibutuhkan	24
6.Tehnik Analisis Data	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
1.Pola Sosialisasi Gender	
1.1.Peran Kerumahtanggaan	27
1.2.Identifikasi Sifat Feminim Dengan Peran Publik	30
1.3.Identifikasi Sifat Feminim Dengan Penempatan Jabatan	31
2.Agen Sosialisasi Gender	
2.1.Agen Transmisi Nilai Gender	34

2.2.Agen Pengetahuan Tentang Peran Kerumahtanggaan	38
3.Agen Sosialisasi Yang Efektif	40
4.Kesadaran Politik	
4.1.Sikap Dan Tindakan Terhadap Kemitrasejajaran	41
4.2.Tunutan Persamaan Hak	43
4.3.Kesadaran Akan Anti Diskriminasi	43
4.4.Pengetahuan Politik	45
 BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN	
1.Kesimpulan	49
2.Saran	54
 Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Peran Kerumahtanggaan Bagi Perempuan	28
Tabel 2. Landasan Menjalankan Peran kerumahtanggan Di Dalam Keluarga	29
Tabel 3. Feminisasi Dalam Peran Publik	30
Tabel 4. Pendidikan Dalam Jabatan Di Pekerjaan Formal	32
Tabel 5. Usia Dalam Jabatan Pada Pekerjaan Sektor Formal ...	32
Tabel 6. Status Perkawinan Dalam Penempatan Jabatan Di Pekerjaan Sektor Formal	33
Tabel 7. Usia Dalam Transmisi Nilai Gender	34
Tabel 8. Pendidikan Responden Dalam Transmisi Nilai Gender	35
Tabel 9. Status Perkawinan Dalam Transmisi Nilai Gender	36
Tabel 10. Pekerjaan Dalam Transmisi Nilai Gender	37
Tabel 11. Perolehan Pengetahuan Responden Dalam Menjalankan Peran Kerumahtanggaan Di Dalam Keluarga	38
Tabel 12. Kesempatan Dalam Aktivitas Organisasi	39
Tabel 13. Agen Penyadaran Gender	40
Tabel 14. Peluang Perempuan Dalam Persaingan Posisi di Tempat Kerja	42
Tabel 15. Penghambat Kesejajaran Posisi Dalam Pekerjaan.....	42
Tabel 16. Tuntutan Persamaan	43
Tabel 17. Pemahaman Terhadap Produk UU Perlindungan Perempuan	44
Tabel 18. Agen Sosialisasi Nilai-Nilai Politik.....	45
Tabel 19. Sikap Terhadap Nilai-Nilai Politik	46
Tabel 20. Tindakan Politik Perempuan	47

BAB I PENDAHULUAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1. Latar Belakang

Persoalan gender menjadi sangat penting dan menunculkan persoalan tersendiri ketika terjadi transformasi sosial di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial budaya seiring dengan semakin terbukanya gagasan dan pandangan dilontarkan ke dalam berbagai momen menghasilkan kekuatan besar untuk merevisi kembali prinsip-prinsip sosial yang selama diterima sebagai sesuatu yang baku—taken for granted--.

Seperti kita ketahui selama ini terdapat anggapan umum yang sangat kental di dalam masyarakat bahwa dunia bersifat tunggal -- yakni bahwa hanya ada satu dunia yakni dunia pria, khususnya di sektor publik. Pandangan ini terkikis oleh suatu kenyataan bahwa dewasa ini semakin banyak muncul fenomena baru dalam diri kaum perempuan. Secara kuantitas maupun kualitas kaum wanita mulai banyak terjun berkarir di sektor publik.

Perubahan tersebut muncul bersamaan dengan kesadaran kaum perempuan bahwa mereka adalah bagian integral dalam negara dan masyarakat, sehingga merekapun berhak menjadi bagian dari dunia publik politik. Di samping itu tuntutan demokrasi yang semakin besar telah mendesak terjadinya proses transformasi peran baik bagi pria maupun perempuan yang bersifat lebih egalitarian.

Secara mendasar kemunculan kesadaran perempuan akan perannya di dunia publik-politik dipicu oleh beberapa hal. *Pertama*, hanya perempuan yang peduli dan bisa memperjuangkan secara

gigih akan hapusnya segala diskriminasi yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaaan jender yang sangat merugikan kaum wanita. Selama ini wanita berada dalam kesadaran palsu akan peran dan fungsinya di dalam masyarakat. Pada sisi lain ada usaha untuk membuat wanita berpikir tentang dirinya sendiri sebagai kelompok yang minoritas dan jangan sampai mereka mulai berpikir tentang implikasi dari fakta bahwa mereka adalah mayoritas. Dan alam pikiran perempuan larut dalam meneguhkan mitologi tersebut.

Kedua, erosi sebuah mitos tunggal tentang dunia (politik) yang disebabkan gaung gerakan feminisme. Selama ini want terpasung oleh norma dan budaya yang sangat patriarkhal di mana perempuan adalah inferior, subordinasi. Hegemoni kekuasaan yang dibangun kaum pria dengan mengabaikan seksualitas lain menjadikan kehidupan politik demikian seksis. Ada semacam ketidakseimbangan distribusi kekuasaan antara rasio perempuan dengan pria sehingga perempuan tidak terwakili secara politik. Bahkan Naomi Wolf (1997 : 24). Beranggapan bahwa dengan distribusi kekuasaan akan memunculkan ketakutan dari kaum pria. Ada kesadaran dari pria ketika terjadi distribusi kekuasaan secara merata antara pria dengan wanita, maka akan muncul anggapan seolah-olah wanita mendominasi pria dan pada saat yang bersamaan akan muncul kesadaran wanita bahwa mereka mendominasi pria.

Implikasi dari mithos dunia tunggal tersebut membawa pada marginalisasi kaum wanita, khususnya di dalam perjuangan mencari kekuasaan. Wanita menjadi tidak nampak dalam kehidupan politik sebagaimana pria, sebab wanita tidak dinilai dan diperhitungkan di dalam politik, bahkan dinilai tidak cocok ke dalam bidang politik.

Penanaman nilai, norma dan budaya pemberdayaan jender, pengabaian seksualitas lain, pemahaman yang seksis telah berlangsung berabad-abad lamanya, baik pada strata masyarakat atas, menengah maupun ke bawah. Aplikasi penanaman norma dan nilai-nilai tersebut dilakukan oleh berbagai media, seperti sekolah, keluarga, media massa, teman sekerja, dsb. Sarana ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat kuat membentuk ideologi gender kepada masyarakat, dan ini sangat terpatri ke dalam pemahaman maupun perilaku masyarakat.

Ideologi gender ini setidaknya memiliki dampak langsung kepada kesadaran kaum perempuan -- sebagai warga kelas dua -- di mana posisi mereka di dalam sistem politik.

Sedangkan sosialisasi gender di dalam masyarakatpun terbedakan berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat. Artinya ada perbedaan sosialisasi gender antara masyarakat kelas bawah, kelas menengah dengan kelas atas. Stratifikasi demikian ini tentunya membawa pengaruh yang sangat kuat di dalam menginternalisasikan nilai-nilai gender yang akan bermuara pada perbedaan sikap politik mereka. Implikasinya ialah sosialisasi gender berdasarkan stratifikasi sosial akan membawa dampak yang sangat besar pada kesadaran politik seseorang.

Stratifikasi sosial bisa juga dalam wujud masyarakat perkotaan dan pedesaan. Masyarakat pedesaan yang senantiasa dilabelkan dengan kehidupan yang sangat tradisional, tradisi patriarkhal masih nampak sekali ketika urusan publik masih menjadi hagemoni kaum pria, yang sulit untuk memunculkan perempuan dalam bidang publik. Walaupun terdapat sedikit peran ekonomi perempuan (sebagai sektor publik), tetapi dalam keseharian justru beban ganda

mesti diperankan oleh perempuan yakni peran privat sekaligus publik yang harus dia lakukan.

Berbeda dengan wilayah perkotaan yang sangat well informed, tentunya beban ganda sudah mulai berkurang, pengakuan akan hak perempuan dalam ranah publikpun sudah agak longgar. Namun bukan berarti ketidakseimbangan gender tidak terjadi. Walaupun perempuan sudah diakui peran publiknya, namun kenyataannya peran privatnya masih di tangan perempuan, sehingga yang terjadi adalah peran dan beban ganda perempuan. Sementara peran dan beban ganda pada pria tidak terjadi. Dan fakta inilah yang menjadi fenomena ketidakadilan yang terjadi pada perempuan. Situasi ini terjadi karena proses sosialisasi dan internaslisasi yang turun temurun yang jelas-jelas merugikan perempuan.

2. Perumusan Masalah

Berpijak dari pemikiran tersebut maka ada beberapa hal yang akan dipersoalkan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah sosialisasi gender pada perempuan kelas menengah perkotaan ?
2. Agen-agen apakah yang digunakan untuk mensosialisasi peran gender bagi perempuan kelas menengah perkotaan ?
3. Agen sosialisasi apakah yang paling kuat membangun kesadaran gender pada perempuan kelas menengah perkotaan ?
4. Apakah sosialisasi gender pada perempuan kelas menengah mampu membangun kesadaran politiknya ?

3. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan :

1. Memperoleh deskripsi tentang pola sosialisasi gender pada perempuan kelas menengah perkotaan.
2. Memperoleh deskripsi agen-agen yang digunakan untuk mensosialisasi peran gender bagi perempuan kelas menengah perkotaan.
3. Memperoleh deskripsi tentang agen sosialisasi yang paling kuat membangun kesadaran gender pada perempuan kelas menengah perkotaan.
4. Memperoleh deskripsi mengenai apakah peran sosialisasi gender pada perempuan kelas menengah mampu membangun kesadaran politiknya.

4. Manfaat Penelitian

Lewat penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat :

1. Memberikan dan gambaran tentang sosialisasi gender pada perempuan kelas menengah dan pengaruhnya terhadap kesadaran politik, khususnya di Surabaya, sampai sekarang belum tersedia.
2. Menambah perbendaharaan tentang perempuan dan politik yang masih terbatas di perguruan tinggi umumnya dan pusat studi wanita khususnya.
3. Sebagai data dasar yang dapat digunakan sebagai raw input dalam penyusunan kebijakan mengintegrasikan perempuan dalam politik.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi dalam arti luas merupakan proses suatu masyarakat menghantar warganya masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain, masyarakat melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk mensejahterakan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sementara itu, masyarakat mengajar dan memberi latihan bagi angkatan baru untuk membiasakan diri dengan seluruh sistem nilai budaya yang dimiliki masyarakat tersebut. Angkatan baru ini harus mengenal unsur-unsur penting dari sistem nilai budaya masyarakat tersebut, seperti ideologi aspirasi, ilmu pengetahuan, perasaan suka duka, perasaan berbangsa, kaidah-kaidah agama dan moral, adat kepantasan dan sopan santun, kesenian dan ketrampilan serta teknologi.

Agar sosialisasi dapat berjalan teratur dan intensif, masyarakat mempunyai lembaga-lembaga sosialisasi yang diberi tugas untuk menangani sosialisasi tertentu seperti lembaga keagamaan, pendidikan, kebudayaan, politik dan lain-lain. Di samping lembaga resmi dan setengah resmi tersebut, setiap warga masyarakat dan setiap kelompok (kesatuan) dalam kehidupan sehari-harinya, disengaja atau tidak, saling memberikan pengaruh timbal balik untuk membuat sesamanya semakin sempurna, terutama kelompok primer.

Lebih lanjut definisi sosialisasi adalah proses pemindahan (transformasi) budaya, nilai dan norma untuk menyiapkan kehidupan bermasyarakat. Dalam penjelasan yang lebih sederhana, kegiatan memindahkan budaya, nilai dan norma dari generasi ke

generasi itu, bertujuan agar seluruh ide masyarakat (yang meliputi hal yang dianggap baik dan buruk, bernilai atau tidak bernilai, hal apa yang harus dan tidak harus, dilarang atau tidak dilarang) dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh warga masyarakat (Daniel T. Sparingga, 1985/1986: 22). Sosialisasi terdiri dari bermacam-macam hal yang menyangkut budaya, nilai dan norma, diantaranya adalah sosialisasi politik.

Semua anggota masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung mengalami apa yang disebut dengan sosialisasi politik (Alfian 1992:233), sebab bagaimanapun sosialisasi politik merupakan fungsi pemelihara kestabilan politik.

Sebagaimana dinyatakan David Apter (1961), untuk memelihara dan mempertahankan fungsi-fungsi politik maka sosialisasi politik sangat penting. Berbagai simbol-simbol politik, informasi politik dapat ditransmisikan dari satu agen kepada masyarakat lewat sosialisasi politik. Melalui proses sosialisasi politik ini anggota masyarakat mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang oleh karena itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari.

Banyak pakar politik yang mengemukakan definisi sosialisasi politik. Sosialisasi politik sebagai proses mempelajari semua sikap politik, nilai politik, perilaku politik. Beberapa peneliti memandang sosialisasi sebagai proses belajar tetapi hanya sebagai proses yang hanya akan menimbulkan suatu sistem politik yang stabil. Nilai-nilai politik ini hanya akan mempelajari hal-hal yang diyakini akan mempertahankan status quo. Nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang tentunya terkait dengan atau adalah bagian dari nilai-

nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem politik selalu berupaya membentuk kultur politik yang sama supaya ditransmisikan kepada anggota. Dalam transmisi tersebut bisa terjadi suatu kultur politik lama diganti oleh kultur politik baru, tergantung kepada kemauan elit politik. Dengan demikian sosialisasi politik selalu terjadi dalam masyarakat demi mempertahankan eksistensi politik.

Produk dari sosialisasi politik ialah serangkaian orientasi terhadap sistem politik. Ada 3 orientasi politik yaitu kognisi, afeksi dan evaluasi. Dari orientasi politik tersebut dapat dicermati sejauh mana sosialisasi politik memberikan output bagi eksistensi politik.

Di dalam proses sosialisasi ini ada suatu tahapan-tahapan tertentu bagi anak yang disosialisasi, di mana pada setiap tahapan sosialisasi tersebut apa yang dinamakan agen sosialisasi menjadi sangat penting. Tahapan tersebut diantaranya :

• *Tahapan Sosialisasi Politik Primer.*

Pada fase pertama anak belajar lewat keluarga. Ini merupakan pengalaman awal yang punya pengaruh yang dalam bagi anak terhadap orientasi politik lebih lanjut. Bill dan Hardgrave (1973) melihat bahwa keluarga dapat melakukan sosialisasi dalam 3 cara yaitu : (a) mentransmisikan sikap politik pada anak; (b) orang tua menjadi model bagi anaknya; (c) peranan dan harapan dari keluarga digeneralisasikan pada obyek politik. Lewat keluarga maka jaringan pertama bagi seseorang disosialisasikan dengan nilai-nilai yang ada.

Ratna Saptari juga sependapat bahwa keluarga memegang peranan penting dalam penanaman nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai ini bisa menyangkut *pilihan*

moral (yang berkaitan dengan apa yang dianggap baik dan buruk) maupun menyangkut *kognisi* (yang berkaitan dengan bagaimana cara menginterpretasi dunia). Namun demikian Ratna melihat bahwa kemungkinan dapat terjadi berbagai arus berlawanan di dalam keluarga itu sendiri dengan nilai-nilai dominan dalam masyarakat atau nilai-nilai dominan yang dipromosikan oleh negara, terutama apabila latar belakang ekonomi, kesukuan, atau agama diikutsertakan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam penginternalisasian nilai-nilai tertentu. Apalagi faktor umur atau generasi dan jenis kelamin maupun pekerjaan masing-masing anggota dalam keluarga ikut diperhitungkan (Ratna Saptari, 1997:224). Dengan kata lain, keluarga merupakan institusi yang sangat penting dalam proses sosialisasi seorang individu, karena institusi ini tidak hanya sebagai transit nilai-nilai dominan dari masyarakat atau negara, namun setiap keluarga bisa memproduksi nilai yang berbeda bagi setiap individu, bahkan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

•*Sosialisasi politik sekunder.*

Fase kedua anak belajar tentang obyek politik ialah melalui lingkungan eksternalnya yaitu sekolah. Bersamaan dengan sekolah pengalaman awal di sekolah bagi anak merupakan elemen penting di dalam pembentukan orientasi politik. Kadang-kadang nilai yang disosialisasikan di sekolah tidak sejalan atau berbenturan dengan nilai yang disosialisasi keluarga. Lamanya seseorang sekolah dan banyaknya pengalaman akan berpengaruh terhadap pengembangan rasa individu mengenai kompetensi politik. Bahkan pengalaman di sekolah merupakan elemen penting bagi pembentukan demokrasi.

Elton dan Hess menyatakan bahwa dari sekolah itu mulailah terbentuk penanaman nilai. Sedangkan Greenstein (1965) melihat bahwa konsepsi pertama tentang otoritas politik lebih bersifat afeksi disosialisasikan lewat sekolah. Dan sekolah itu memperkuat sosialisasi awal di keluarga.

• *Sosialisasi politik tersier.*

Pada tahap ini sosialisasi politik terjadi pada masa kedewasaan seseorang. Dalam proses ini individu diinduksi ke dalam peranan-peranan khusus di dalam sistem politik, mempelajari peran-peran di dalam keahlian, meningkatkan peran di dalam suatu pola nilai, harapan dan pengaruh. Dan salah satu aspek sosialisasi politik pada masa remaja/dewasa menyangkut fungsi yang lebih khusus yaitu peran sosial dan rekrutmen. Sedangkan agen yang melakukan sosialisasi pada tahap tersier ini antara lain teman sekerja, mass media, gereja, kelompok, partai dan sebagainya.

Dari tahapan-tahapan proses sosialisasi tersebut, dalam setiap tahapan terdapat agen yang lebih dominan dalam proses sosialisasi politik. Herbert Heyman dan Paul Allen Beck, sama-sama berpendapat bahwa keluarga dan orang tua merupakan agen utama yang mendorong anak untuk terlibat dalam kehidupan politik. Selanjutnya Paul Allen Beck mengatakan bahwa seiring dengan semakin dewasanya seseorang, peranan suatu kelompok sepeergaulan semakin terasa. Mengenai peranan media massa, Beck melihatnya terbatas pada peningkatan informasi semata-mata dan bukan dalam mempengaruhi aktivitas (Paul Allen Beck, 1977:117-123). Meskipun demikian, Sydney Kraus dan Dennis Davis berpendapat bahwa

peranan media massa perlu diperhitungkan dalam analisis sosialisasi politik masa depan (Kraus dan Davis, 1978:218).

5.2. Gender

Mempelajari peran-peran dalam suatu pola pada tradisi patriarki akan nampak sekali *male bias*. Selama ini pembagian peran di dalam masyarakat begitu jelas -- dan sudah menjadi suatu yang *taken for granted* -- antara pria dan wanita. Pada tradisi ini nilai-nilai pembagian peran disosialisasi sedemikian rupa sehingga jelas pemilahan antara mana kerja atau fungsi yang harus dimainkan pria dan mana yang harus dimainkan wanita.

Secara mendasar ada perbedaan antara jender dan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian yakni kita lahir sebagai laki-laki dan perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok biologi bangunan dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminim dan maskulin. Sejak bayi hingga mencapai usia tua, kita mempraktekkan cara-cara khusus yang telah ditentukan masyarakat kepada kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan.

Julia Cleves Mosse (1996:3), gender adalah seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan pakaian, sikap kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga,

seksualitas tanggung jawab keluarga dan sebagainya -- secara bersama-sama telah memoles peran gender kita.

Begitu lahir kita mulai mempelajari peran gender kita. Kita mempunyai tanggapan berbeda terhadap perilaku pria maupun perempuan. Sejak bayi kita dihadapkan pada perilaku-perilaku yang memperlihatkan stereotipe gender, seperti bahwa perempuan itu berperilaku menenangkan, menghibur, menyayangi. Akibatnya sejak usia enam bulan anak-anak merespon stereotipe gender.

Sebagai orang dewasa kita cenderung meyakini bahwa kita memiliki kebebasan yang sangat berarti dalam arti kita bebas memilih cara kita berperilaku, cara berpikir, cara berpenampilan dan memilih peran gender. Berperilaku feminim dan maskulin menjadi begitu alami akibat langsung kita dilahirkan sebagai pria dan wanita. Yang jelas masyarakat dapat memiliki naskah yang berbeda, tradisi yang berbeda, namun nilai inti dari suatu kultur, yang mencakup peran gender berlangsung dari generasi ke generasi. Namun demikian peran gender tersebut berubah-ubah menyamping dengan waktu dan budaya yang berbeda. Peran tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, etnis, religi, usia, generasi, semangat jaman.

Dewasa ini gender menjadi suatu kajian baru di dalam ilmu politik atau sering dikenal dengan feminisme. Kajian mengenai preemption dan politik dapat dibedakan menjadi dua yakni jenis kelamin atau gender sebagai variabel politik. Dan feminisme sebagai sub bidang kajian ilmu politik. Menurut A. Ramlan Surbakti (1996:37) setidaknya ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendiskripsikan hasil kajian tentang perempuan sebagai variabel politik. *Pertama*, berupa penjelasan yang ditawarkan terhadap pola khusus partisipasi politik perempuan yang umumnya berbentuk

kendala. Termasuk ke dalam kategori ini antara lain sosialisasi politik yang berbeda (dengan pria), karakteristik biologis dan siklus kehidupan, akses yang tak sama terhadap sumber daya, penghargaan yang rendah terhadap pekerjaan rumah, hambatan dan konflik peranan yang bersumber dari orientasi internal dan eksternal, dan seksisme dan diskriminasi yang melembaga.

Kedua, berupa bidang keterlibatan perempuan dalam politik. Kajian ilmu politik dan gender ini berpijak pada realitas politik bahwa ketidaksamaan struktural yang ada antara pria dan perempuan masih berlangsung. Realitas ketidaksamaan ini diperkuat oleh ideologi politik modern dari negara Indonesia yang berasumsi dari perspektif fungsionalis dan konsensus di mana antara pria dengan perempuan memainkan peranan yang berbeda di dalam bidang sosial yang berbeda, peran-peran ini saling komplementer dan sama.

Model konsensus hubungan pria dan perempuan menjadi sangat merasuk ke dalam pemikiran akademis dan pemerintah. Menurut masyarakat model Jawa mengalokasikan posisi yang berbeda pada setiap jenis kelamin. Peran utama dan tugas perempuan lebih dipusatkan pada manajemen kerumahtanggaan, kelahiran dan sosialisasi. Pria diidentifikasi sebagai pemberi, penjaga dan representasi dari realisme dan situasi yang non keluarga. Peran dan tugas perempuan cenderung mengkaitkannya dengan kerumahtanggaan di mana perempuan sangat bertanggungjawab dengan kebutuhan fisik dan emosional anggotanya. Pria ditarik dari rumah ke dalam arena publik di mana mereka merepresentasi keluarganya. Segregasi peran dan bidang kerja yang dipengaruhi oleh jenis kelamin dilihat sebagai sarana di

mana pria memperoleh akses dan monopoli kekuasaan di dalam struktur dan proses formal (Norma Sullivan, 1996:61-62).

Tanter dan Young (1993) menyatakan bahwa ada variasi-variasi kelas dalam ekspresi seksualitas yang diwarnai oleh implikasi-implikasi politik. Hampir sebagian besar masyarakat memilih pemimpin formal pria. Karena itu, keputusan yang menyangkut orang banyak (publik) sering lebih ditentukan oleh pria daripada oleh wanita. Wilayah publik, yang terdiri atas pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur, dihampir semua masyarakat di dunia didominasi laki-laki. Yang jelas, ada perempuan individu yang memasuki dan mungkin pada akhirnya memimpin pranata semacam itu, namun di mana-mana tidak ada perempuan sebagai satu kelompok yang menjalankan kekuasaan dan pengaruh di wilayah publik dengan cara yang sama seperti yang dilakukan laki-laki. Suku, kelas dan agama mungkin memainkan peran yang besar dalam memutuskan laki-laki mana yang menjalankan kekuasaan, tetapi akses perempuan terhadap kekuasaan senantiasa lebih kecil dibandingkan akses laki-laki dari latar belakang yang sama (Julia Cleves Mosse, 1996:106).

Konsep gender menurut Virginia Sapiro (1983) sesungguhnya merupakan ekspresi psikologis dan budaya dari jenis kelamin yang sifatnya biologis menjadi peran dan perilaku sosial tertentu, di mana perempuan di sektor domestik dan pria di sektor publik. Pemilahan peran domestik untuk perempuan dan peran publik untuk pria sesungguhnya bukanlah kodrati (nature) tetapi lebih bernuansa pada buatan (nurture). Nilai-nilai semacam itu terus menerus disosialisasikan dan diinternalisasi kepada masyarakat. (ideologi

gender) sehingga masyarakat menganggap bahwa pemilahan peran publik dan privat sebagai suatu kewajiban.

Implikasi lebih jauh ideologi gender tersebut ialah munculnya ketimpangan struktural atau ketidakseimbangan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Ketidakseimbangan gender tentunya akan semakin merugikan posisi wanita sebab dengan kondisi tersebut wanita semakin menjadi subordinat dan inferior terhadap jenis kelamin lain.

Menurut Manshur Fakhri (1996:12-13) ketidakadilan gender disebabkan oleh perbedaan gender, yang bisa dialami oleh pria dan perempuan khususnya. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik pria maupun perempuan menjadi korban tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipi atau melalui pelabelan negatif, kekerasan atau violence, beban kerja lebih banyak dan lebih panjang, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan saling mempengaruhi secara dialektis. Ketidakseimbangan gender tersebut tidak hanya terjadi dalam institusi keluarga namun juga merasuk secara transparan ke dalam institusi sosial politik dan ideologi gender semakin kokoh tertanam dalam anggapan masyarakat menjadi gender stereotype.

Ketidakadilan gender ini akan semakin memperlemah upaya perempuan untuk meraih kekuasaan (battle of power) dalam domain publik. Ini bisa disimak dengan terbatasnya kesempatan perempuan

mencapai kekuasaan formal, sehingga yang terjadi adalah hegemoni kekuasaan oleh jenis kelamin pria.

Ideologi gender telah begitu kuat menciptakan sebuah konstruksi sosial dalam alam pikiran masyarakat yang kemudian terwujud dalam penciptaan dan pemeliharaan struktur sosial yang ada. Karena kesuksesan menurut Schumpeter (1951) menyebabkan posisi fungsional individu menjadi semakin penting terhadap kekuasaan dan sumber material (Giddens, 1987:218), dan tanda terpenting dari status wanita dimana-mana adalah tingkat partisipasi mereka dalam kehidupan ekonomi dan kontrol mereka terhadap kekayaan dan produk yang diproduksinya, keduanya merupakan faktor yang dapat dikaitkan dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat (Leavitt dalam Giddens 1987:ibid), Oleh karena itu, Lenski (1966) berpendapat bahwa wanita merupakan kelas tersendiri karena kurangnya kekuasaan mereka.

Persoalan ketidakadilan gender ini telah melahirkan berbagai kritik dari kalangan feminis. Menurut teologi feminis, perempuan harus menempatkan posisinya dalam masyarakat supaya sejajar kedudukannya dengan pria dan dapat merubah struktur sosial menjadi sama rata. Hal ini bisa terwujud manakala terjadi perubahan pemahaman tentang feminisme.

Menurut feminisme radikal, pria dan perempuan secara fundamental berbeda dengan feminisme dan maskulinisme. Hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat dan menentukan nasibnya masing-masing berdasarkan pribadi. Namun tidak dapat terjadi bila masih berlaku patriarkhal dalam masyarakat. Sehingga feminisme radikal menyarankan supaya terjadi kesejajaran antara feminisme mode dan masculinism mode dalam masyarakat. Prasyarat

utama dihancurkannya hukum patriarki masyarakat. Hubungan kedua mode tersebut dapat berjalan dengan menghapus cinta antara keduanya yang menjadikan timbulnya hubungan ketergantungan satu sama lain akan terhapus dan memunculkan kesejajaran. (Ratna Megawangi, 1999:111-192).

Karl Marx maupun Engels tidak menolak adanya hubungan cinta antara pria dengan perempuan dalam rangka menciptakan kesejajaran antara pria dan perempuan. Perhatiannya justru pada terbentuknya suatu pernikahan yang akan menghambat kreativitas perempuan secara bebas dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial. Karl Marx dengan pernyataannya bahwa kesadaran manusia tidak sebagai penentu eksistensi, tetapi eksistensi sosial yang menentukan kesadaran mereka, mencoba menganalisis bahwa perubahan sosial akan mampu menciptakan perubahan pada individu sehingga keadilan sosial tercapai. Asumsi Marx ini kebanyakan didukung oleh para pendukung feminis liberal yang didasarkan pada pendapat John Locke tentang natural rights dimana manusia mempunyai hak hidup, mendapatkan kebebasan dan memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu untuk mencapai harus digunakan rasionalitas yang tinggi. Pemikiran ini didasari oleh filsafat eksistensi dimana suami mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi untuk bekerja di sektor luar rumah sedangkan isteri bergantung kepada suami dan hanya berkutat di sektor domestik. (Ratna Megawangi, 1999: *ibid*).

Pemahaman feminisme liberal ini yang agaknya mengilhami pencarian keseimbangan gender di Indonesia. Fenomena ini terlihat ketika berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilahirkan

oleh pemerintah senantiasa mengacu pada kemitrasejajaran antara pria dan perempuan.

5.3.Kelas Menengah

Dengan mengacu pada pandangan Marx tentang kelas sosial yang muncul akibat adanya hubungan sosial yang tidak harmonis antara kelas atas dan kelas bawah maka dapat dinyatakan bahwa ketidakadilan gender juga menyebabkan munculnya dua kelas sosial dalam masyarakat yakni pria sebagai kelas sosial yang super-ordinat yang melakukan opresi terhadap jenis kelamin lainnya yakni perempuan dan perempuan sebagai kelas sosial yang subordinat yang diopresi oleh pria. Dengan posisi yang tidak seimbang ini yang terjadi adalah suatu hubungan eksploitasi. Manifestasi hubungan ini adalah beban lebih pada perempuan.

Pengkategorian kelompok sosial tersebut lebih dilatar belakangi oleh ketidaksamaa sosial tertentu. Menggunakan analisis Weberian yang dikutip dari bukunya Richard Tenter dan Keneth Young (1990:10-11), strukturisasi kelas bisa didasari oleh : (1).posisi ekonomi yakni pemilikan modal dan sarana; (2).ketidak samaan status yang lebih menunjuk pada estimasi kehormatan dan prestise (distribution of honour and prestige) yang terindikasi pada gaya konsumsi individu (style of consumption) dan (3).kekuasaan politik (political power) . Sebaliknya, Howard Dick (1990) dalam persoalan kategori konsumsi, ia menunjukkan bahwa kelas menengah berkolerasi dengan pilihan hidup gaya baru (choicheof new life style) dengan lingkungannya. Jadi pola konsumsi sebagai bahan pegangan

(a matter of cathing), kesadaran kelas praktis dalam kelakuan (action), atau lebih tepatnya bagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri dan lingkungan yang melingkupinya (Ibid, hal 11).

Strukturisasi kelas secara tersirat selalu menyatakan kesadaran kelas. Kesadaran kelas terutama mencakup pengakuan tentang adanya satu atau beberapa kelas lain. Persepsi tentang identitas kelas, secara tidak langsung menyatakan tentang pengetahuan tentang ciri-ciri yang memisahkan antara anggota kelas yang satu dari anggota kelas yang lain. Tetapi ada juga kemungkinan untuk mengklasifikasi berbagai tingkat "kesadaran kelas" (Giddens 1982:127-128). Setiap tingkat kesadaran kelas dapat terwujud dalam perilaku semua orang atau dalam diri sebagian besar anggota suatu kelas atau hanya dalam diri kelompok-kelompok tertentu dalam kelas tersebut (ibid, h.129). Secara eksplisit Marx dalam diktumnya menyatakan bahwa kondisi sosial menentukan kesadaran, yang dapat ditafsirkan sebagai kelas sosial menentukan kesadaran.

Dalam pembahasan ini kajian hanya terfokus pada **kelas menengah** yang oleh Dale Johnson (1985) diartikan sebagai sebuah kumpulan dinamis yang tumbuh dalam ruang diantara dua kelas yang terpolarisasi. Pengertian yang lebih kongkrit dikemukakan oleh Richard Robison (1999: 35) sebagai suatu kelas yang mencakup kelompok-kelompok sosial yang berkembang yang dianggap berada diantara buruh dan petani atau kelas bawah, di satu pihak dan kelas yang berkuasa apakah itu feodal atau kapitalis di pihak lain.

Para kelas menengah ini menurut Wright, tipikalnya adalah telah mengenali basis kekuasaan baru, kepentingan material tersendiri, membayangkan sebuah struktur produksi baru yang mengandalkan kemampuan organisatoris, ilmu pengetahuan, ijazah,

informasi, wacana, kewenangan (profesional dan intelektual), dan politik-birokrasi (pejabat negara) sebagai aset utama. Oleh karena itu, eksistensi mereka tidak hanya yang terlibat dalam struktur yang berporos produksi pemodal-pekerja karena posisi mereka dalam struktur masyarakat tidak hanya berbasis ekonomi semata. Mereka bisa berperan sebagai pegawai negeri, seniman, pemuka agama, perwira militer, manajer, profesional, ahli, tokoh-tokoh intelektual, wiraswasta dan sebagainya (Ariel H, 1999: xix).

Keberadaan kelas menengah dengan penguasaan aset dan akses tersebut di dalam konteks dinamika sosial politik dalam banyak hal memiliki arti penting yang oleh Daniel S. Lev (1986) di sebut sebagai juru bicara paling artikulatif dari ide-ide, tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan kepentingan-kepentingan baru; sebagai pihak pengimplementasi hal-hal tersebut atas nama wiraswasta kapitalis, sebagai perwakilan gaya hidup dan selera baru; sebagai model yang cakap dan terpercaya dari keragaman baru status tinggi; serta sebagai pelaku reformasi (Tanter and Young, 1993:48).

Sedangkan Robinson (Tanter dan Young, 1993:10) yang mengamati munculnya kelas menengah di Indonesia, menyatakan bahwa pembelahan masyarakat ke dalam kelas sosial tertentu dengan basis kesamaan life style dimana lebih menitikberatkan pada perbedaan pemilikan kuantitas uang. Analisis Robinson ini sebenarnya juga memakai dasar analisis posisi ekonomi dalam kelompok-kelompok tertentu dengan mengaitkan pada kapital dan negara. Dari konsep kelas menengah yang dikemukakan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa mereka diposisikan sebagai kelompok masyarakat baru yang unik atas dasar posisi ekonomi yang menggunakan ukuran *style of consumption* seseorang. Mereka-

mereka yang disebut dengan kelas menengah baru pada umumnya memerlukan suatu kohesi yang menjadi identitas atau simbol-simbol atas status mereka. Simbol atau identitas status mereka terrefleksi dalam perubahan-perubahan sytle of consumption yang kemudian menjadi pola sikap atau kelakuan dalam kehidupan kesehariannya. Simbol-simbol serta identitas yang mengintegrasikan individu ke dalam pelapisan sosial.

Namun yang jelas kehadiran kelas menengah di Indonesia lebih mudah dijelaskan dengan sebuah kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan memperoleh akses dalam pembangunan dapat dikatakan sebagai sebagai common denominator yang mempersatukan berbagai kelompok ke dalam kelas menengah Indonesia. Yang dimaksud akses disini adalah peluang memperoleh dan menikmati hasil-hasil pembangunan, informasi, pendidikan, hubungan dengan dunia luar, mobilitas serta penguasaan aset. Penguasaan aset dapat berupa pemilikan sejumlah kekayaan fisik dan non fisik seperti keahlian, ketrampilan serta kedekatan dengan kelompok elit (Benny Subianto:23). Keberadaan kelas ini secara mencolok dapat dilihat dalam pola konsumsi serta pilihan gaya hidup.

Yang jelas signifikansi kelas menengah bertolak pada kenyataan bahwa mereka membentuk fenomena sosial baru yang searah dengan tuntutan zaman. Mereka memiliki beberapa aset-aset pemilikan fisik dan non fisik yang menjadikan terbedakan dengan kelompok masyarakat, sehingga cenderung menjadi suatu kelas sosial tertentu di dalam masyarakat.

6. Definisi Konsep

6.1. Sosialisasi Gender

Adalah transmisi nilai-nilai gender oleh agen-agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah peer group, tempat kerja, organisasi kepada individu sehingga nilai-nilai gender yang telah terinternalisasi tersebut akan tercermin menjadi sebuah pemahaman dan pengetahuan tentang gender yang pada akhirnya individu mengambil sikap dan tindakan memperjuangkan kepentingan gender.

6.2. Kesadaran Politik

Adalah kemampuan pemahaman dan pengetahuan politik seseorang, sehingga memunculkan keinginan untuk bisa bersikap dalam kehidupan politik dan bertindak untuk terlibat secara sukarela dalam aktivitas politik.

6.3. Kelas Menengah

Adalah sekelompok masyarakat yang dicirikan dengan kriteria memiliki aset baik fisik (kekayaan yang dimiliki) maupun non fisik (ketrampilan, keahlian, informasi, pendidikan) yang mampu mengakses terhadap perubahan-perubahan dalam pembangunan dan menjadi jembatan relasi kelas elit dengan kelas bawah..

BAB II METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab peneliti hendak mencari sedalam-dalamnya bagaimana sosialisasi politik tentang peran gender yang berlangsung di kalangan kelas menengah perkotaan. Serta agen apakah yang paling kuat dalam proses sosialisasi gender yang mampu menumbuhkan kesadaran politik perempuan.

2. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah semua perempuan kelas menengah yang berstatus sudah menikah maupun belum menikah, yang bekerja di sektor publik formal, non formal dan bekerja. Untuk sampel akan disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, yakni hanya mengambil 50 orang dengan alasan bahwa sampel bersifat homogen yakni wanita kelas menengah.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sample akan ditarik secara Purposive Sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teknik ini digunakan dengan nalar bahwa kita sudah mengetahui secara jelas kriteria sampel yakni



perempuan kelas menengah perkotaan, sehingga perempuan yang tidak masuk dalam kategori kelas menengah tidak termasuk sebagai sampel..

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan lewat wawancara dengan responden yang terpilih dalam penelitian. Disini peneliti akan menggunakan pedoman wawancara yang sifatnya semi terbuka, sehingga dimungkinkan bagi responden untuk memberikan jawaban sesuai yang diinginkan. Selain itu digunakan tehnik dokumentasi untuk melihat perkembangan perempuan di Kota Surabaya, khususnya di daerah yang menjadi sampel penelitian.

5. Jenis Data Dan Data Yang Dibutuhkan

Ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung dari responden dan data yang dibutuhkan adalah data tentang agen pola sosialisasi jender, agen-agen sosialisasi jender permasalahan dalam sosialisasi jender, kesadaran politik perempuan, status dan pekerjaan responden.

Sedangkan data sekunder diperoleh lewat pengumpulan buku, dokumen, literatur. Data sekunder yang dibutuhkan ialah data mengenai penduduk, pekerjaan penduduk, proporsi penduduk, proporsi pemilih, jumlah organisasi, kondisi geografis kota Surabaya, Proporsi perempuan dalam jabatan/eselon.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan baik data kuantitatif maupun kualitatif akan dianalisis secara kualitatif. Data disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi yang kemudian diinterpretasi secara teoritik. Sebelumnya dilakukan kategorisasi-kategorisasi sehingga akan tersaji lebih jelas masing-masing variabel yang dianalisis.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Sosialisasi Gender

1.1. Peran Kerumahtanggaan (Privat)

Gender sebuah kata yang mungkin baru dalam wacana intelektual maupun dalam kehidupan masyarakat awam. Bahkan masyarakat awam mungkin masih asing terhadap kata gender. Ini terjadi karena diskursus gender baru berkembang dalam wacana intelektual pada tahun 1980-an. Dan kini kajian tentang gender sangat berkembang pesat.

Pada masyarakat kelas menengah membuat kategori peran sering dikacaukan dengan kategori peran kodrati (menstruasi, melahirkan, menyusui), dimana peran kodrati disamakan dengan peran sosial, seperti ibu wajib menjalankan peran-peran privat (menjahit, memasak, mendidik anak dsb).

Pemahaman kategori sosial hal ini kenyataannya pada kaum perempuan kelas menengahpun masih sangat terbatas. Fenomena ini dapat dilihat bahwa dari 50 responden dalam penelitian ternyata yang merasa menjalankan peran kerumahtanggaan di dalam kehidupan keluarga saja sebanyak 46%, sedangkan yang merasa menjalankan peran kerumahtanggaan baik di dalam keluarga dan lingkup pekerjaan sebanyak 18%, kemudian yang merasa menjalankan peran kerumahtanggaan baik dalam keluarga, lingkup pekerjaan dan organisasi sosial sebanyak 20 %, sedangkan yang merasa menjalankan peran kerumahtanggaan tidak di dalam kehidupan keluarga namun hanya di dalam lingkup pekerjaan dan organisasi sosial

sebanyak 16%. Untuk jelasnya lihat tabel 1 tentang peran kerumahtanggaan bagi perempuan.

Tabel 1. Peran Kerumahtanggaan Bagi Perempuan

Peran Kerumahtanggaan Dalam Aktivitas	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Keluarga	23	46 %
Keluarga, Lingkup Pekerjaan	9	18 %
Keluarga, Lingkup Pekerjaan dan Organisasi Sosial	10	20%
Lingkup Pekerjaan dan Organisasi Sosial	8	16%
Total	50	100 %

Sumber: Jawaban responden pada kuesioner No.8, Surabaya, 1999

Dengan demikian menjalankan peran kerumahtanggaan yang dilakukan perempuan sesungguhnya merupakan stereotipi bagi peran-peran sosialnya. Peran yang dibakukan oleh budaya sebagai ideologi gender terbukti menunjukkan masih diyakini oleh responden. Namun demikian kenyataannya pelabelan oleh masyarakat inipun tetap ada di dalam pemahaman kaum perempuan.

Berbagai alasan mengapa seseorang lebih disosialisasi menjalankan peran kerumahtanggaan dalam keluarga menunjukkan variasinya. Alasan tersebut bisa dikategorikan karena tuntutan keluarga, kebiasaan dalam masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah norma.

Responden yang menjalankan peran kerumahtanggaan di dalam keluarga, dengan alasan adanya tuntutan keluarga sebanyak 74%, karena norma yang ada di dalam masyarakat sebanyak 17%, dan yang menjawab lain-lain (kemampuan/ketrampilan yang dimiliki hanya sebatas peran privat) sebanyak 9%. Untuk jelasnya dibawah ini disajikan tabel 2.

Tabel 2. Landasan Menjalankan Peran Kerumahtanggaan Di Dalam Keluarga

Landasan Menjalankan Peran Kerumahtanggaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tuntutan Keluarga	17	74 %
Norma Masyarakat	4	17 %
Lain-lain	1	9%
Total	23	100 %

Sumber : Jawaban Responden Pada Kuesioner No. 11, Surabaya, 1999.

Namun dalam menjalankan peran kewanitaan tersebut kebanyakan responden memahami dan merasakan sebagai hal yang wajar-wajar saja sebab hal ini sudah dianggap keumuman yang terjadi dalam masyarakat. Di antara 23 responden yang menjalankan peran kewanitaan di dalam lingkup keluarga, diperoleh sebuah data mengenai perasaan ketika menjalani peran kerumahtanggaan tersebut, sebanyak 96 % menganggap sebagai hal yang biasa saja, sedangkan 4% menjawab tidak enak dengan alasan menjalankan peran tersebut tidak senantiasa atas kehendaknya sendiri.

Pada sisi lain seringkali perempuan justru bangga dengan sifat feminimnya yang dimiliki (lembut, penghibur, penyayang), yang notabene sebagai nilai yang ditanamkan oleh kaum pria. Seringkali kebanggaan akan sifat feminimnya mewujudkan dalam segala peran-peran yang dilabelkan peran wanita.

Di antara 50 responden yang ada, ternyata 93 % (47 orang) merasa bangga dengan sifat kewanitaan yang dimiliki, bahkan sebanyak 68 % (34 orang) dari 50 responden bangga mewujudkan sifat kewanitaannya ke dalam peran/pekerjaan yang bersifat kewanitaan. Data tersebut ternyata berkorelasi dengan data No. 10 yang menyatakan dari 50 responden, hanya 20 % (10 orang) yang pernah merasa menuntut persamaan hak.

1.2. Identifikasi Sifat Feminim Dengan Peran Publik

Sifat feminim dalam menjalankan peran publik di lingkup pekerjaan seperti melakukan pekerjaan yang identik dengan jenis kelamin perempuan, misalnya bekerja sebagai sekretaris, humas, kasir swalayan, penjual bunga, dst, dianggap sebagai suatu hal yang mentradisi dalam masyarakat, sehingga sulit bagi masyarakat untuk menolak labeling akan peran kewanitaan tersebut dengan sifat feminisnya. Dari 50 responden diperoleh sejumlah data, mengenai pandangan responden terhadap dirinya dan kaumnya mengapa dapat bekerja di lingkup pekerjaan yang bersifat kewanitaan. Sebanyak 42% responden menjawab bahwa peran kewanitaan yang ada dalam lingkup pekerjaan tersebut sesuai dengan sifat kewanitaannya. Sebanyak 38% responden menjawab karena lingkup pekerjaan yang bernuansa peran kewanitaan tersebut sejak dahulu identik dengan wanita itu sendiri, sedangkan 18% responden menjawab hanya lingkup pekerjaan kewanitaan tersebut yang memang disediakan untuk wanita itu sendiri. Sedangkan sisanya 2% responden menjawab lain-lain. Untuk jelasnya dibawah ini tabel 3 yang mengilustrasikan pandangan di atas.

Tabel 3. Feminisasi Dalam Peran Publik

Feminisasi Dalam Peran Publik	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
Karena pekerjaan tersebut memang sesuai dengan sifat kewanitaan anda dan kaum wanita,	21	42 %
Karena dari dulu pekerjaan tersebut identik dengan perempuan	19	38 %
Karena dalam dunia pekerjaan, hanya pekerjaan itu yang disediakan untuk kaum perempuan	9	18 %
Lain-lain	1	2 %
Total	50	100 %

Sumber : Jawaban Responden Pada Kuesioner No. 13, Surabaya, 1999.

Dengan demikian sesungguhnya di dalam masyarakat terjadi pengacauan antara sifat-sifat feminim dengan peran-peran sosial. Sifat feminim seperti teliti, halus, lembut sering dilabelkan dengan peran perempuan di sektor domestik dan labeling ini menjadi suatu norma yang saat ini masih kental dalam masyarakat. Pada sisi lain pekerjaan-pekerjaan yang sering disediakan bagi perempuanpun masih dipahami pekerjaan-pekerjaan yang masih terkait dengan 'sifat keperempuannya' (misal: teller, sekretaris, bendahara).

1.3. Identifikasi Sifat Feminim Dengan Penempatan Jabatan

Bekerja di sektor formal (misal sebagai eksekutif, PNS, profesi) maka jabatan/posisi yang dipegang oleh wanita kebanyakan hanya sebagai staff atau karyawan biasa. Jarang mereka berposisi sebagai pengambil keputusan. Dari 38 responden yang bekerja di sektor formal merasa bekerja sebagai karyawan biasa sebanyak 82%, sedangkan yang mempunyai jabatan tertentu di dalam pekerjaannya sebanyak 11%, kemudian yang merasa sebagai pengambil keputusan sebanyak 5%, sedangkan yang merasa dirinya sebagai pimpinan hanya sebesar 2 %.

Bila dikaitkan dengan pendidikan responden nampak bahwa 81,58% ditempatkan sebagai karyawan dengan kategori 52,63% berpendidikan S1, dan 28,95% berpendidikan diploma. Sedangkan yang memiliki jabatan kebanyakan berpendidikan sarjana sebesar 10,53%; yang menduduki posisi sebagai pengambil keputusan sebanyak 5,26% dengan kategori 2,63% berpendidikan Sarjana dan 2,63% berpendidikan pasca sarjana. Untuk jabatan pimpinan sebanyak 2,63% berpendidikan sarjana. Untuk jelasnya dibawah ini disajikan tabel 4.

Tabel 4. Pendidikan Dalam Jabatan di Pekerjaan Sektor Formal

Penempatan Kerja	Pendidikan				Total
	SMU	Diploma	S1	Pasca S1	
Karyawan	-	11 (28,95%)	20 (52,63%)	-	31 (81,58%)
Mempunyai jabatan	-	-	4 (10,53%)	-	4 (10,53%)
Pengambil Keputusan	-	-	1 (2,63%)	1 (2,63%)	2 (5,26%)
Pimpinan	-	-	1 (2,63%)	-	1 (2,63%)
Total		11 (28,95%)	26 (67,47%)	1 (2,63%)	38 (100%)

Sumber : Jawaban Responden Pada Kuisioner No. 14, Surabaya, 1999

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa perempuan kebanyakan berposisi sekedar sebagai karyawan biasa walaupun dari segi pendidikan cukup memadai. Posisi pimpinan ataupun pengambil keputusan bagi perempuan sangat minim sekali dalam pekerjaan-pekerjaan di sektor publik.

Namun untuk usia nampaknya tidak begitu memiliki korelasi dengan penempatan jabatan. Di samping itu usia seseorangpun menunjukkan terdapat suatu korelasi dengan kenaikan posisi. Untuk jelasnya tabel 5 di bawah ini menyajikan gambaran di atas.

Tabel 5. Usia Dalam Jabatan Di Pekerjaan Sektor Formal

Penempatan Kerja	Usia			Total
	22 - 28	29 - 37	≥ 38	
Karyawan	14 (36,84%)	17 (44,74%)	-	31 (81,58%)
Mempunyai jabatan	-	2 (5,26%)	1 (2,63%)	3 (7,89%)
Pengambil Keputusan	-	1 (2,63%)	1 (2,63%)	2 (5,26%)
Pimpinan	-	1 (2,63%)	1 (2,63%)	2 (5,26%)
Total	14 (36,84%)	21 (55,26%)	3 (7,89%)	38 (100%)

Sumber : Jawaban Responden Pada Kuisioner No. 14, Surabaya, 1999

Hampir 81,58% perempuan yang berusia dibawah 38 tahun tetap sebagai karyawan biasa. dan yang mempunyai jabatan , pengambil keputusan dan pimpinan kebanyakan usia di atas 37 tahun.

Di samping usia dan pendidikan, faktor status menikah ternyata memiliki kecenderungan berpengaruh terhadap posisi perempuan dalam pekerjaan di sektor formal. Hampir 50% perempuan bekerja dengan status menikah dan 50% bekerja dengan status belum menikah. Namun untuk jabatan-jabatan strategis seperti pengambil keputusan, pimpinan ternyata justru kebanyakan dari perempuan yang berstatus belum menikah. Untuk jelasnya cermati tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Status Perkawinan Dalam Penempatan Jabatan Di Pekerjaan Sektor Formal

Penempatan Kerja	Status Perkawinan		
	Menikah	Tidak menikah	Total
Karyawan	19 (50,00%)	12 (31,58%)	31 (62,00%)
Mempunyai jabatan	-	4 (10,53%)	4 (10,58%)
Pengambil Keputusan	-	2 (5,26%)	2 (5,26%)
Pimpinan	-	1 (2,63%)	1 (2,63%)
Total	19 (50,00%)	19 (50,00%)	38 (100%)

Sumber : Jawaban Responden Pada Kuesioner No. 14, Surabaya, 1999

Dengan demikian kebanyakan perempuan berpeluang meniti karir dalam jabatan strategis justru pada saat dia belum menikah. Sedangkan kedudukan sebagai karyawan biasa justru dari mereka yang sudah menikah.

Menurut responden hal ini disebabkan mereka sulit untuk mencapai karir gemilang sebab masih disibukkan dengan urusan kerumahtanggaan sesampai mereka berada di dalam rumah.

2. Agen Sosialisasi Gender

2.1. Agen Transmisi Nilai Gender

Agen sosialisasi gender menjadi sangat berperan dalam membentuk nilai-nilai gender atau dalam membangun *gender sensitivity* pada masyarakat. Lewat agen ini masyarakat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gender. Agen sosialisasi ini dapat dilihat seperti keluarga, sekolah, tempat sekerja maupun organisasi mempunyai nilai yang berbeda. Ini terjadi ketika dikaitkan dengan variabel usia, pendidikan, agama, status perkawinan dan pekerjaan.. Untuk lebih detilnya lihat tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Usia Responden Dalam Transmisi Nilai Gender

Agen Transisi Nilai	Usia			
	≤21	22-28	29 ≥	Total
	F - (%)	F - (%)	F - (%)	%
Keluarga	2 (4,00%)	9 (18,00%)	12 (24,00%)	33 (66%)
Keluarga, Lingkup pekerjaan	0	3 (6,00%)	5 (10,00%)	8 (16%)
Keluarga, Lingkup pekerjaan, dan Organisasi Sosial	-	4 (8,00%)	7 (14,00%)	11 (22%)
Lingkup pekerjaan dan Organisasi sosial	-	2 (4,00%)	6 (12,00%)	8 (16%)
Total	2 (4,00%)	18 (36,00%)	30 (60,00%)	50 (100%)

Sumber : Jawaban Responden Pada Pertanyaan No. Surabaya, 1999

Dari data di kebanyakan bahwa responden yang berusia 22-27 tahun menyatakan bahwa agen transmisi tetap pada keluarga. Sedangkan hanya responden yang berusia 22-28 tahun yang menyatakan bahwa keluarga dan lingkup pekerjaan sangat

menentukan dalam transmisi nilai gender. Sedangkan 14% responden berusia di atas 38 tahun mengatakan bahwa keluarga, lingkpu pekerjaan dan organisasi sosial merupakan agen transmisi nilai. Dan hanya 4% responden yang mengabaikan keluarga sebagai agen transmisi yakni mereka yang berusia 22-28 tahun dan 12% berusia di atas 38 tahun juga mengabaikan keluarga sebagai agen transmisi nilai. Ke dua kelompok umur ini lebih melihat lingkup pekerjaan dan organisasi sosial menjadi agen transmisi nilai gender. Dengan demikian hampir di semua umur tetap menyatakan bahwa keluarga menjadi agen terpenting dalam penanaman nilai gender.

Pendidikan juga merupakan faktor yang penting dalam mencermati transmisi nilai. Untuk lebih detilnya bisa dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Pendidikan Dalam Transmisi Nilai Gender

Agen Transisi Nilai	Pendidikan			
	SMU	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)
Keluarga	3 (6,00%)	7 (14,00%)	13 (26,00%)	
Keluarga, Lingkup pekerjaan	-	4 (8,00%)	5 (10,00%)	-
Keluarga, Lingkup pekerjaan, dan Organisasi Sosial	-	3 (6,00%)	7 (14,00%)	-
Lingkup pekerjaan dan Organisasi sosial	-	2 (4,00%)	5 (10,00%)	1 (2,00%)
Total	3 (6,00%)	16 (32%)	30 (60,00%)	1 (2,00%)

Sumber : Jawaban Responden Pada Pertanyaan No. Surabaya, 1999

Sejumlah 26% responden yang berpendidikan sarjana tetap menyatakan pentingnya keluarga sebagai agen transmisi nilai. Hanya 4% responden yang berpendidikan diploma dan 10% yang berpendidikan sarjana serta 2% responden berpendidikan pasca sarjana yang mengabaikan keluarga sebagai agen transmisi nilai gender. Mereka melihat lingkup pekerjaan dan organisasi sosial merupakan agen terpenting dalam transmisi nilai gender. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa baik mereka yang berpendidikan SMU, Diploma, Sarjana (46% responden) tetap melihat keluarga sebagai agen penting dalam transmisi nilai.

Faktor penting lainnya sebagai pengontrol keterkaitan agen transmisi nilai adalah status perkawinan responden. Status perkawinan akan sangat menentukan tentang agen mana yang paling penting di dalam sosialisasi nilai gender. Untuk mendekripsikannya bisa dilihat tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Status Perkawinan Dalam Transmisi Nilai Gender

Agen Transisi Nilai	Status Perkawinan	
	Menikah	Tidak Menikah
	F-(%)	F-(%)
Keluarga	14 (28,00%)	9 (18,00%)
Keluarga, Lingkup pekerjaan	4 (8,00%)	5 (10,00%)
Keluarga, Lingkup pekerjaan, dan Organisasi Sosial	6 (12,00%)	4 (8,00%)
Lingkup pekerjaan dan Organisasi sosial	5 (10,00%)	3 (6,00%)
Total	29 (58,00%)	21 (42%)

Sumber : Jawaban Responden Pada Pertanyaan No. Surabaya, 1999

Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa 28% responden yang menikah melihat bahwa keluarga merupakan agen transmisi nilai. Dan sebanyak 12% responden yang menikah melihat bahwa keluarga, lingkup pekerjaan dan organisasi sosial merupakan agen terpenting

dalam sosialisasi nilai gender. Pengabaian keluarga sebagai agen transmisi nilai gender terdapat pada 10% responden yang menikah dan 6% responden yang tidak menikah. Dengan demikian perempuan baik yang berstatus menikah maupun belum menikah tetap berpegang bahwa keluarga adalah yang merupakan agen terpenting dalam transmisi nilai gender. Untuk lebih jelaskan lihat tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Pekerjaan Dalam Transmisi Nilai Gender

Agen Transmisi Nilai	Pekerjaan		
	Formal	Informal	Total
	F-(%)	F-(%)	F-(%)
Keluarga	15 (30,00%)	8 (16,00%)	23 (46,00%)
Keluarga, Lingkup pekerjaan	6 (12,00%)	3 (6,00%)	9 (18,00%)
Keluarga, Lingkup pekerjaan, dan Organisasi Sosial	4 (8,00%)	10 (20,00%)	14 (28,00%)
Lingkup pekerjaan dan Organisasi sosial	4 (8,00%)	-	4 (8,00%)
Total	28 (56,00%)	21 (42,00%)	50 (100,00%)

Sumber : Jawaban Responden Pada Pertanyaan No. Surabaya, 1999

Sebanyak 30% responden yang bekerja di sektor formal maupun 16% yang berada di sektor informal melihat bahwa keluarga satu-satunya agen terpenting dalam mensosialisasi nilai gender. Sebanyak 8% responden yang bekerja di sektor formal melihat bahwa keluarga bukan agen penting dalam menanamkan nilai gender. Sebanyak 20% responden yang bekerja di sektor informal menganggap bukan hanya keluarga sebagai agen transmisi nilai gender, tetapi juga lingkup pekerjaan, dan organisasi sebagai agen. Sebanyak 12% yang bekerja di sektor formal dan 6% yang bekerja di sektor informal melihat hanya keluarga dan lingkup pekerjaan mereka menentukan sosialisasi nilai gender.

Dengan demikian keluarga tetap sebagai agen terpenting dalam transmisi nilai di kalangan perempuan yang bekerja di sektor formal maupun informal

2.2. Agen Pengetahuan Tentang Peran Kerumahtanggaan

Perolehan pengetahuan akan peran kerumahtanggaan kebanyakan diperoleh dalam keluarga. Keluarga tempat interaksi utama bagi individu memiliki sumbangan yang besar dalam menginternalisasikan nilai-nilai peran wanita. Diantara 23 responden yang menjalani peran kerumahtanggaan di dalam kehidupan keluarga, memperoleh pengetahuan mengenai cara menjalani peran kewanitaan tersebut dari orang tua atau anggota keluarga terdekat sebanyak 65%. Dari masyarakat sekitar 9%, sedangkan dari media cetak/elektronik 17%. Untuk jelasnya di bawah ini gambaran yang memperjelas argumentasi tersebut.

Tabel 11. Perolehan Pengetahuan Responden Dalam Menjalankan Peran Kerumahtanggaan Di Dalam Keluarga

Asal Pengetahuan Kerumahtanggaan	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Orang tua/ Keluarga terdekat	15	65 %
Masyarakat Sekitar	2	9 %
Media Cetak/ Elektronik	4	17 %
Lain-lain	2	9 %
Total	23	100 %

Sumber : Jawaban Responden Pada Pertanyaan Kuesioner No. 10, Surabaya, 1999

Sementara agen lain yang ikut berperan dalam proses sosialisasi gender adalah organisasi. Lewat organisasi ini terjadi pertukaran pengetahuan antar individu di dalam organisasi tersebut. Di samping itu organisasi memungkinkan berkembangnya wacana diskursus tentang

peran perempuan. Kiprah waita dalam organisasi politik pada masa keterbukaan bukanlah merupakan sesuatu yang absurd atau tabu. Kesamaan di bidang politikpun disosialisasikan dalam lingkup keluarga, sekolah, tempat atau organisasi politik yang dianggap sebagai wahana yang efektif. Sementara perlakuan yang sama di organisasi politikpun mestinya diperoleh kaum perempuan khususnya pada posisi penting. Untuk jelasnya lihat tabel 12.

Tabel 12. Kesempatan Dalam Aktivitas Organisasi

Aktivitas di Organisasi	Frekuensi	Prosentase
Kesempatan Sama	5	28%
Kesempatan tidak sama	13	72%
Total	18	100%

Sumber : Jawaban Responden Pada Pertanyaan Kuesioner No. 10, Surabaya, 1999

Di antara 18 responden yang merasa aktif dalam organisasi sosial, yang merasa mendapat kesempatan tidak sama untuk menduduki jabatan tertentu akibat kewanitaannya sebanyak 72% responden. Sedangkan yang menjawab tidak mengalami hambatan sebanyak 28% responden

Akan tetapi jabatan yang diberikan di organisasi politikpun kadang diidentikkan dengan peran feminimnya. Dari 18 responden yang aktif dalam organisasi sosial, sebanyak 87% berpendapat ada jabatan dalam organisasi yang identik dengan kaum wanita, sedangkan sisanya sebanyak 13% responden menjawab tidak ada.

3. Agen Sosialisasi Yang Efektif

Sosialisasi gender akan menghasilkan berbagai pemahaman dan pengetahuan mengenai gender yang mungkin selama ini tidak diperoleh perempuan dalam keluarga atau lingkungan sekolah. Penyadaran gender merupakan salah satu cara untuk memberikan kemungkinan terjadinya keadilan jender. Sementara agen yang memberikan penyadaran gender bermacam-macam. Dari 50 responden yang mengatakan pernah mendapat penyadaran gender sebanyak 10 orang sementara 40 orang sama sekali tidak memperoleh penyadaran gender. Untuk lebih jelasnya di bawah ini tabel 13 yang menyajikan penyadaran gender pada perempuan,

Tabel 13. Agen Penyadaran Gender

Agen Penyadaran Gender	Frekuensi	Prosentase
Media cetak/elektronik	5	50
Lembaga Pendidikan	3	30%
LSM	1	10
Teman	1	10
Total	10	100%

Sumber: Jawaban Responden Pada Pertanyaan No.22, Surabaya, 1999

Diperoleh sejumlah data dari 50 responden, sebanyak 20 % (10 orang) merasa pernah mendapatkan penyadaran gender, dari media cetak/elektronik sebanyak 50 % (5 orang), dan dari lembaga pendidikan sebanyak 30 % (3 orang), sebanyak 10% (1 orang) memperoleh dari LSM wanita, dan sebanyak 10 % (1 orang) memperoleh dari teman.

Sikap dan tindakan yang diambil wanita ketika ada yang telah membangun kesadaran kesetaraan pria dan wanita. Dalam berbagai hal terdapat sebagian wanita yang saat ini menerima apa adanya; karena

belum semua masyarakat mengerti (terutama kaum pria) bahwa pria dan wanita itu adalah setara, tetapi di sisi lain sebagian wanita lainnya menuntut kesetaraan sekalipun mendapat pertentangan baik dari kaum pria maupun dari kaum wanita yang setuju adanya ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Fenomena ini dapat dilihat bahwa 20 % responden yang merasa telah mendapatkan penyadaran gender, sebanyak 9 responden (90 %), menerima penyadaran gender namun tidak mengaplikasikan dalam bentuk tuntutan persamaan peran. Sedangkan sisanya 2 responden (10 %) mengaplikasikannya ke dalam bentuk tuntutan persamaan peran di lingkungan keluarga, pekerjaan dan organisasi sosial.

4. Kesadaran Politik Perempuan

4.1. Sikap Dan Tindakan Terhadap Mitra Kesejajaran

Sikap politik perempuan untuk memperoleh dukungan terhadap kesetaraan merupakan suatu indikator adanya kesadaran politik pada perempuan untuk memperjuangkan nasibnya sebagai warga yang teropresi. Situasi ini dapat dicermati dari pendapat responden.

Ketika ditanya mengenai kesempatan dalam bekerja yang bisa diperoleh oleh responden, ketika bersaing dengan kaum pria, sebanyak 39,47% responden menjawab mampu mencapai posisi sejajar di atas kaum pria, sedangkan sisanya 60,56% responden menjawab tidak bisa sejajar dengan kaum pria bahkan cenderung di bawah kaum pria akibat tiadanya kesempatan yang ada.

Dengan demikian di tempat kerja kenyataannya perempuan hampir tidak bisa bersaing dengan pria dalam menempati posisi yang sejajar. Hal ini karena adanya kebijakan yang diskriminatif yang berlaku di

kantor selain perempuan jarang mau berkompetisi dengan pria. Wanita lebih suka pasrah terhadap posisinya. Tabel 14 dibawah ini akan lebih mempermudah untuk pemahaman.

Tabel 14. Peluang Perempuan Dalam Persaingan Posisi
Di Tempat Kerja

Peluang Perempuan Memperoleh Posisi Dalam Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
Kesejajaran	15	39,47%
Ketidaksejajaran	23	60,53%
Total	38	100%

Sumber: Jawaban responden Pada Pertanyaan No.15

Bahkan seringkali dalam menjalankan pekerjaan dan meniti karir di lingkup pekerjaan, perempuan karena keperempuanannya kadang sering terhambat. Di bawah ini tabel 15 yang menyajikan hambatan yang sifatnya seksis.

Tabel 15. Penghambat Kejajaran Posisi Perempuan Dalam Pekerjaan

Faktor Penghambat Kesejajaran Posisi	Frekuensi	Prosentase
Kodratnya	19	38%
Kemampuannya	12	24%
Tidak Tahu	7	14%
Total	38	100%

Sumber: Jawaban responden Pada Pertanyaan No.16

Diperoleh data dari 38 responden yang bekerja yang merasa dihambat di lingkup pekerjaan karena dirinya adalah dikodratkan sebagai perempuan sebanyak 38%. Sedangkan yang tidak merasa dihambat karena kodratnya tetapi karena memang kemampuannya yang terbatas sebanyak 24 % responden, sisanya sebanyak 14% responden menjawab tidak tahu.

Dengan demikian kategori seksis masih sangat kental di lingkup pekerjaan perempuan. Diskriminasi yang didasarkan atas kodratnya atau kategori budaya kenyataannya masih bersemi di ruang publik.

4.2. Tuntutan Persamaan Hak

Tuntutan persamaan peran antara pria dan wanita menjadi cara yang efektif untuk mencapai kemitrasejajaran. Diperoleh sejumlah data dari 50 responden yang benar-benar pernah menuntut persamaan peran yang tidak hanya didasarkan atas perbedaan jenis kelamin dalam kehidupannya, sebanyak 20 % (10 orang) responden. Sedangkan sisanya 80 % (40 orang) berpendapat tidak perlu menuntut persamaan peran.

Tabel 16. Tuntutan Persamaan

Tuntutan Persamaan Peran	Frekuensi	Prosentase
Perlu	10	20%
Tidak Perlu	40	80%
Total	50	100%

Sumber: Jawaban responden Pada Pertanyaan No.20, Surabaya, 1999

Dari sini bisa disimpulkan betapa fatalisnya perempuan terhadap persamaan hak. Perempuan lebih bersikap pasrah dan menerima terhadap posisi yang diberikan di tempat kerja.

4.3. Kesadaran Akan Anti Diskriminasi

Produk undang-undang atau peraturan seringkali tidak mencerminkan keadilan gender, bahkan cenderung mengabaikan posisi perempuan. Bahkan sampai saat ini ratifikasi UU Anti Diskriminasi belum terbentuk sehingga kadang-kadang pelanggaran-pelanggaran

terhadap hak perempuan masih diketemui baik di lingkup keluarga, sekolah, organisasi maupun negara.

Produk UU yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuanpun dalam kenyataannya banyak perempuan yang belum memahami bahkan belum mengetahuinya. Penyadaran hukum mengenai dimana peran dan kedudukan perempuan, misal ada tidaknya produk UU yang memberikan tempat bagi perempuan—masih sangat minim dilakukan baik oleh negara maupun lembaga-lembaga yang berkompeten. Untuk menilai hal ini dapat dilihat pada tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17 .Pemahaman terhadap Produk UU Perlindungan Perempuan

Pemahaman terhadap PerUU Perlindungan Perempuan	Frekuensi	Prosentase
Tidak Paham	50	100%
Paham	0	0%
Total	50	100%

Sumber: Jawaban responden Pada Pertanyaan No.24

Dari 50 responden, ternyata tidak ada yang menyatakan mengetahui bahwa apakah ada produk perundang-undangan yang menyatakan pria dan wanita adalah setara dalam berperan di kehidupan bermasyarakat. Undang-undang yang memberikan perlindungan kepada perempuanpun masih belum disadari dan diketahui oleh kaum wanita. Akibatnya tindakan individu lain terhadap perempuan dianggap sebagai hal-hal yang wajar.

4.4. Pengetahuan Politik

Nilai-nilai politik seperti: (a). Keadilan/Persamaan, (b). Penghapusan diskriminasi, (c). Demokrasi/HAM, (d). Kebangsaan, (e). Parpol, (f). Masalah Politik lainnya merupakan suatu nilai yang dalam anggapan masyarakat merupakan ranah yang pantas dijelajah oleh kaum pria menjadikan perempuan terpinggirkan dari sisi politik praktis. Terpinggirnya wanita dari dunia politik tidak lepas dari akesptansi perempuan terhadap nilai yang ditanamkan baik dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Untuk jelasnya tabel 18 dibawah ini menyajikan data tentang nilai politik yang ditanamkan oleh agen sosialisasi.

Tabel 18. Agen Sosialisasi Nilai-Nilai Politik

Nilai Politik Yang Ditanamkan	Agen Sosialisasi							
	Keluarga		Lembaga Pendidikan		Lingkungan Kerja		Mass Media	
	f	%	f	%	F	%	f	%
Keadilan/ Persamaan	13	26 %	11	22 %	27	54 %	7	14 %
Penghapusan Diskriminasi	6	12 %	8	16 %	3	6 %	4	8 %
Demokrasi/HAM	7	14 %	9	18 %	7	14 %	24	48 %
Kebangsaan	12	24 %	12	24 %	6	12 %	10	20 %
Parpol	11	22 %	7	14 %	5	10 %	3	6 %
Lain-lain	1	2 %	3	6 %	2	4 %	2	4 %
Total	50	100%	50	100 %	50	100 %	50	100 %

Sumber: Jawaban Responden Pada Kuisisioner No. 27 sampai dengan No, 30

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai Keadilan/Persamaan lebih banyak ditanamkan oleh lingkungan kerja responden yaitu 54%. Sedangkan sosialisasi nilai penghapusan diskriminasi lebih banyak diperoleh lewat jalur lembaga pendidikan, nilai demokrasi ditanamkan lewat agen Media Massa (48% responden) , dan sebanyak 24% responden

melihat bahwa jalur keluarga dan lembaga pendidikan sama-sama pentingnya sebagai agen mensosialisasi nilai kebangsaan. Sedangkan nilai partai politik kebanyakan pemahamannya diperoleh lewat jalur keluarga, serta 6% responden melihat nilai-nilai politik lainnya ditanamkan lewat jalur pendidikan.

Dengan demikian agen sosialisasi nilai politik sehingga memunculkan pengetahuan-pengetahuan politik pada perempuan lebih banyak diperoleh lewat jalur non-keluarga seperti media massa dan lembaga pendidikan. Hanya sedikit nilai-nilai politik yang ditanamkan kepada perempuan lewat jalur keluarga.

Penanaman nilai-nilai politik ini sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan politik yang diambil perempuan. Sikap terhadap nilai politik tersebut bisa apatis atau bisa responsif. Untuk jelasnya bisa dilihat tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19. Sikap Terhadap Nilai-Nilai Politik

Sikap Terhadap	Apatis		Responsif		Total
	F	%	F	%	
Keadilan	20	40 %	30	60 %	50
Penghapusan Diskriminasi	18	36 %	32	64 %	50
Persamaan/Emansipasi	23	56 %	22	44 %	50
Demokrasi	19	38 %	31	12 %	50
Kebangsaan	11	22 %	39	78 %	50
HAM	26	52 %	24	48 %	50
Parpol	40	80 %	10	20 %	50

Sumber: Jawaban Responden Pada Kuesioner No. 31 sampai dengan No. 37 :

Dari data di atas diperoleh gambaran bahwa sikap apatis responden lebih banyak pada nilai Politik (80% responden) sedangkan terhadap nilai Persamaan/Emansipasi 56% responden bersikap apatis, juga dalam nilai persamaan. Responden lebih responsif terhadap nilai

keadilan (60%) dan nilai kebangsaan (78%) dan nilai penghapusan diskriminasi.

Yang cukup menarik adalah ketika kebanyakan responden belum memperoleh penyadaran gender tetapi nilai penghapusan diskriminasi menjadi kepedulian mereka. Namun diskriminasi yang mereka peroleh lebih banyak pada perosalan kesukuan, agama, ras daripada gender.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa perempuan sebenarnya mereka masih sedikit responsif terhadap nilai-nilai politik baik yang ditanamkan lewat media massa, lembaga pendidikan maupun lewat hubungan pertemanan.

Setelah mereka memperoleh pemahaman politik dan sikap politik, maka tindakan-tindakan politik merupakan suatu proses menuju kesadaran politik. Tindakan politik ini dapat dilihat dari tindakan memperjuangkan ataupun tidak bertindak sama sekali. Disinilah akan terlihat kualitas kesadaran politik perempuan. Di bawah ini tabel 20 yang menguraikan tentang tindakan yang diambil perempuan terhadap nilai dan sikap politiknya.

Tabel 20. Tindakan Politik Perempuan

Tindakan	Memperjuangkan		Wacana		Tidak bertindak		Total
	F	%	F	%	F	%	
Keadilan	5	16 %	17	57 %	8	27 %	30
Penghapusan Diskriminasi	-	-	15	47 %	17	53 %	32
Persamaan/ Emansipasi	-	-	11	50 %	11	50 %	22
Demokrasi	7	23 %	14	45 %	10	55 %	31
Kebangsaan	-	-	18	46 %	21	54 %	39
HAM	-	-	19	79 %	5	21 %	24
Parpol	-	-	6	60 %	4	40 %	10

Sumber: Jawaban Responden Pada Kuesioner No. 31 sampai dengan No, 37

Berpijak dari data di atas terlihat bahwa nilai-nilai politik baik demokrasi, keadilan, HAM, persamaan, kebangsaan dan Parpol lebih banyak sekedar sebagai wacana (mendiskusikan, membicarakan) daripada mengambil tindakan terhadap nilai-nilai tersebut (misal: aktivis partai politik, aktivis HAM, aktivis Demokrasi, Aktivis Gender dsb). Apalagi pada tindakan memperjuangkan nilai-nilai tersebut yang sebenarnya pada tataran sekarang sedang diupayakan oleh sebagian besar masyarakat.

Nampaknya perempuan masih alergi untuk berkiprah dalam tindakan-tindakan politik. Ini terkait dengan ketiadaan waktu mereka yang terserap untuk tugas gandanya yakni rumah tangga dan kantor, sehingga tidak memungkinkan untuk berperan di dalam aktivitas politik. Kondisi yang demikianlah yang menjadikan perempuan terpinggirkan dalam aktivitas politik. Dengan demikian sosialisasi lebih pada nilai kerumahtanggaan daripada nilai gender, pada akhirnya memunculkan sikap yang apatis dan tindakan politik yang pasif pada perempuan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Persoalan sosialisasi gender ternyata merupakan persoalan yang sangat pelik dan kenyataannya banyak dihadapi oleh kaum perempuan. Kategori sosial tentang peran publik dengan peran privat kenyataan sudah demikian tersosialisasi lewat lembaga keluarga, teman sepermainan, tempat kerja maupun organisasi.

Dari hasil temuan dan pembahasan bisa disimpulkan beberapa hal di bawah ini:

- Menjalankan peran privat (kerumahtanggaan) bagi perempuan sebenarnya merupakan setereotipi bagi peran sosialnya. Domestikasi peran yang meyakini bahwa dalam keluarga itulah perempuan menjalankan sebuah norma sosial. Ini terlihat sebanyak 46% di dalam kehidupannya menjalankan peran kerumahtanggaan di keluarga. Namun demikian di lingkup kantor, organisasi sosial peran-peran domestik tersebut juga dijalankan.
- Alasan dalam menjalankan peran domestik tersebut sudah—given—sehingga terjadi kerancuan dalam pemilahan peran kodreti dengan peran sosial. Fenomena ini terlihat dari 74% responden yang beralasan bahwa mereka menjalankan peran tersebut karena tuntutan keluarga.
- Ketika norma masyarakat yang sudah dibakukan menjadi sebuah budaya maka yang muncul adalah kesadaran palsu perempuan bahwa menjalankan peran domestik merupakan kewajiban

perempuan. Fenomena ini tampak bahwa 70% menganggap menjalankan peran kerumahtanggaan adalah wajar-wajar saja bagi perempuan.

- Kesadaran palsu ini bahkan memunculkan sifat kebanggaan bagi perempuan apabila dia mempunyai sifat feminim yang pada akhirnya menjadi landasan untuk memojokkan perempuan pada kategori kodrat dalam aktivitas sosialnya. Ini nampak sekali ketika 93% responden menyatakan kebanggaannya dengan sifat kewanitaannya.
- Adanya pengacauan antara sifat feminim dengan peran-peran publik. Feminimtas peran publik terjadi ketika 42% responden menyatakan bahwa pekerjaannya di kantor sesuai dengan sifat keperempuannya.
- Posisi dalam ruang publik yang mempunyai nilai sosial tinggi kenyataannya sulit untuk dicapai perempuan meskipun pendidikan yang diperoleh setingkat sarjana bahkan pasca sarjana. Posisi pengambil keputusan minim sekali dicapai perempuan. Fenomena ini bisa dicermati dimana sebanyak 81,58% perempuan hanya sebagai karyawan biasa. Hanya 2,63% perempuan yang berkedudukan sebagai pimpinan dan pengambil keputusan dan mereka berpendidikan sarjana dan pasca sarjana.
- Usia dengan asumsi semakin tua semakin bertambah pengalaman dan pengabdian kenyataannya tidak ada artinya bagi perempuan untuk menduduki posisi penting Pada usia lebih dari 38 tahun perempuan baru bisa menjadi pengambil keputusan, pimpinan ataupun punya jabatan penting itupun mereka berpendidikan di atas sarjana.
- Status perkawinan kenyataannya sangat berpengaruh terhadap perempuan dalam masuk pasaran kerja dan meniti karirnya. Fakta

menunjukkan bahwa sebanyak 50% perempuan bekerja dengan status belum menikah. Kesibukan peran domestik yang dijalankan di rumah mengakibatkan perempuan sulit untuk memperoleh posisi penting di kantor.

- Agen yang mensosialisasi nilai-gender lebih banyak dijalankan oleh keluarga. Tahap sosialisasi primer yakni keluarga merupakan agen terpenting dalam menanamkan nilai-nilai gender. Ini nampak bahwa pada semua umur, 33% perempuan menyatakan keluarga sebagai agen transmisi nilai-nilai tidak gender.
- Bahkan pada perempuan yang memiliki status pendidikan tinggi ternyata tetap melihat bahwa keluarga sebagai agen pertama yang mengacaukan peran kodrat dengan peran sosial perempuan.
- Perempuan baik yang sudah menikah maupun belum menikah tetap beranggapan bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi nilai yang tidak gender. Ini terlihat sebanyak 23% perempuan menyatakan keluarga sebagai agensi penting dalam transmisi nilai-nilai kewanitaan.
- Pengetahuan tentang peran domestik diperoleh lewat agen primer yakni keluarga terdekat dan orang tua (65% responden).
- Diskriminasi kesempatan dalam aktivitas organisasi dalam arti perempuan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan pria. Fenomena ini tampak dari 72% responden yang bekerja menyatakan adanya diskriminasi di sekitarnya.
- Feminisasi jabatan terjadi di organisasi sosial dimana perempuan masuk. Ini terlihat ketika 87% responden berpendapat bahwa ada jabatan yang bisa dimasuki perempuan asalkan sesuai dengan sifat feminimnya.

-
- Terjadi lack of information tentang penyadaran gender pada perempuan. Kenyataannya hanya 10% perempuan yang memperoleh pengetahuan mengenai penyadaran gender. Dan sumber informasi yang dianggap sebagai media penyadaran gender adalah media cetak dan media elektronik.
 - Perempuan begitu pesimis bahkan cenderung fatalis akan kemampuannya dalam mencapai karirnya. Ini nampak ketika 60,56% responden melihat tidak adanya kemungkinan memperoleh posisi yang setara sebagaimana pria.
 - Faktor penghambat bagi emansipatori perempuan adalah anggapan yang sudah given tentang peran kodratnya yang sangat kental pada kaum perempuan. Sebanyak 50% responden menyatakan bahwa karena kodratnyalah yang menghambat perkembangan karir perempuan.
 - Sikap skeptis, pesimis bahkan fatalis menjadi kecenderungan perempuan untuk tidak memperjuangkan persamaan hak di tempat kerja. Ini kelihatan ketika 80% responden menyatakan tidak perlunya melakukan tuntutan persamaan hak, karena hanya sia-sia.
 - Pemahaman terhadap institusi negara—dalam hal ini produk UU yang memberikan perlindungan kepada perempuan—masih sangat rendah yakni sebanyak 100% perempuan tidak memahami adanya berbagai produk per UU yang sering mengabaikan keadilan bagi perempuan.
 - Nilai-nilai politik seperti keadilan, penghapusan diskriminasi, demokrasi dan HAM, kebangsaan, Parnpol lebih banyak diperoleh lewat agen sekunder dan agen tersier yakni lembaga pendidikan,

lingkungan kerja dan media massa daripada agen primer seperti keluarga.

- Perempuan lebih banyak bersikap responsif terhadap nilai-nilai penghapusan diskriminasi (ras, golongan, agama), keadilan dan kebangsaan. Sedangkan terhadap nilai emansipasi, parpol HAM perempuan cenderung apatis.
- Perempuan lebih suka hanya mengambil sikap daripada bertindak dalam aktivitas politik. Ini terkait dengan ketiadaan waktu mereka untuk berkiprah di dunia politik. Fenomena ini terlihat ketika responden menyatakan persoalan keadilan, penghapusan diskriminasi, persamaan/emansipasi, demokrasi, kebangsaan, HAM dan parpol sekedar sebagai wacana daripada sebagai suatu tindakan untuk memperjuangkannya.

Dari beberapa fenomena di atas dapat dirujuk bahwa "gender" dalam arti maupun aplikasinya masih jauh dari pemahaman kaum perempuan. Perempuan walaupun dia masuk ke dalam kategori kelas menengah nampaknya masih dikacaukan oleh terminologi "kodrati" perempuannya dengan "peran sosialnya". Penyadaran gender dalam masyarakat baik melalui berbagai jalur masih belum menyentuh pada pemahaman dan aplikasi akan nilai-nilai gender.

Pada akhirnya sosialisasi nilai-nilai gender berimplikasi terhadap kesadaran politik perempuan, sebab masih terdapat pemahaman di kalangan perempuan kelas menengah bahwa ruang publik politik lebih mencerminkan sebuah "masculine mode" daripada "famine mode" sebagaimana yang diungkapkan Ratna Megawangi. Dalam ruang politik yang ditemui senantiasa unsur-unsur kekerasan, kelicikan, yang sangat bertolak belakang dengan kelembutan, kejujuran, kesabaran. Oleh

karena itu “ruang politik” merupakan ruang yang tidak “sesuai” bagi perempuan. Ruang politik sama sekali tidak mencerminkan sifat feminim yang senantiasa menjadi label bagi perempuan, dan tidak perlu dimasuki oleh kaum perempuan.

Sosialisasi nilai gender yang kebanyakan diperoleh pada tahap primer melalui keluarga ternyata terinternalisasi sedemikian rupa dan menjadi sangat kental dalam predisposisi perempuan. Akibat dalam jangka panjang perempuan sulit untuk masuk ke dalam kompetisi politik, karena keengganan perempuan masuk ke dalam dunia tersebut.

2.Saran

Transformasi nilai-nilai gender merupakan wujud menuju masyarakat yang demokratis sebab akan berkembang situasi yang egalitarian. Mengembangkan nilai-nilai gender bukan sekedar tanggung jawab kaum perempuan tetapi merupakan tanggung jawab semua masyarakat. Namun demikian lembaga pendidikan yang mengembangkan sebuah “wacana gender” menjadi ujung tombak dalam menghapuskan ketidakseimbangan gender. Adapun beberapa cara yang bisa ditempuh oleh lembaga pendidikan untuk membantu kaum perempuan dalam mencapai keseimbangan gender adalah sebagai berikut:

- Riset lebih dalam lagi tentang makna “gender” kepada perempuan dengan melihat kelas-kelas sosial. Dengan demikian akan diperoleh suatu *treatment* yang berbeda antara kelas sosial tersebut di dalam penyadaran gender.

- Mengembang diskursus gender pada semua lapisan masyarakat baik lewat dialog, pelatihan/kursus, media massa/cetak/elektornik.
- Mengembangkan informasi lebih luas pengetahuan mengenai nilai-nilai gender kepada segenap masyarakat.
- Action Risert mengenai usaha-usaha pemberdayaan perempuan lewat sosialisasi nilai-nilai gender kepada perempuan dari berbagai kelas sosial.
- Pengefektifan jaringan gender baik LSM, perguruan tinggi, dalam menangani permasalahan perempuan khususnya menyangkut upaya pemberdayaan perempuan. Meluruskan kembali pengacauan “kodrat perempuan” dengan “peran sosial” perempuan perlu segera dilakukan, demi mencapai kesetaraan antara perempuan dengan pria.
- Penyadaran gender tidak sekedar diperuntukkan bagi kaum perempuan, tetapi juga kaum pria, sebab pria selama ini yang melakukan hagemoni kekuasaan atas kaum perempuan. Oleh sebab itu perlu ada pendidikan gender pada kaum pria.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E, *The Politics of Modernization*, Chicago University Press. Chicago, 1965.
- Abdulah, Irwan, *Sangkan Paran Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997
- Bill, James A dan L Hardgrave Jr, Robert, *Comparative Politics: The Quest for Theory*, Charles E Merril Publishing Company, Ohio, 1973.
- Budiardjo, Mirriam dan Pudjiastuti, Tri Nuke (Ed.), *Teori-Teori Politik Dewasa Ini*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Cantor, Dorothy W (dkk), *Women In Power* (terjemahan), PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Cord, Robert L (dkk), *Political Science: An Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1985
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1999
- Greenstein, Fred I, "Political Socialization" dalam *International Encyclopedia of Social Science*, New York, 1968
- Hadidjaya (ed.), *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999
- Holzner, Brigitte M, "Pendekatan Dasar Analisa Gender", *makalah*, Pusat Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Unibraw dan Universitas Leiden. Malang, 1990
- Kemdah, James Var der, *Stereotypes And Conceptions of the Female Role*, NY Willey, 1979

Megawangi, Ratna, *Bagaimana Meredakan?*, Pusataka Pelajar, Jakarta, 1999

Mosse, Julia Cleves, *Gender Dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996

Rush, Michael dan Althoff Phillip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Radjawali Press, Jakarta, 1986

Sapiro, Virginia, *The Political Integration of Women Roles: Socialization and Politics*, University of Illinois Press, USA, 1983

Sullivan, Norma, "Gender And Politics in Indonesia", dalam Maila Stivens, *Why Gender Matters In South East Asian Studies*, Monash University Clayton, 1996.

Wolf, Naomi, *Gegar Gender*, Pustaka Semesta Press, Yogyakarta, 1997.

LAMPIRAN PENELITIAN

**PENGARUH SOSIALISASI GENDER PADA WANITA KELAS
MENENGAH TERHADAP KESADARAN POLITIK**

LAMPIRAN I

Kategori : Studi Kajian Wanita
Tahun : 1999/2000
Univ/Inst/Akademi : Universitas Airlangga
Nama Peneliti : Dra.Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, MA.

1.Keterangan Umum

1.Judul Penelitian : Pengaruh Sosialisasi Nilai Gender Pada Wanita Kelas Menengah Terhadap Kesadaran Politik

2.Dibiayai Melalui Proyek:

- Nomor : 270/P2IPT/DP3M/SKW/VI/1999
- Tanggal : 1 Juni 1999

3.Jumlah Biaya Penelitian : Rp.4.500.000,-

4.Peneliti : Drs.Bintoro Wardiyanto, MSi.

KUESIONER

I. Identitas Responden :

1. Nama :
2. Pekerjaan : (Formal/Informal: Hanya diisi oleh petugas)
3. Umur : (a) \leq 21 tahun, (b) $22 \leq @ \leq$ 28 tahun, (c) $29 \leq @ \leq$ 37 tahun, (d)tahun
4. Status : (a) Belum menikah, (b) Menikah, (c)
5. Agama : (a) Islam, (b) Kristen, (c) Katolik (d) Hindu (e) Budha (f)
6. Penghasilan : (a) $<$ Rp. 300.000,- (b) Rp. 300.000,- $< @ <$ Rp. 700.000,- (c) $>$ Rp. 700.000,-
7. Pendidikan terakhir : (a) SMU, (b) Diploma, (c) Sarjana. (d)

II. Daftar Pertanyaan Khusus :

8. Apakah anda merasa menjalankan peran kewanitaan di dalam kehidupan anda?
(a) Ya, (b) tidak
9. Jika ya, di dalam kelompok mana peran tersebut dijalani?
(a) Keluarga, (b) Lingkup pekerjaan, (c) Organisasi sosial, (d) Jawaban a, b, dan c, (e)
10. Jika di dalam keluarga, anda menjalani peran kerumahtanggaan (seperti melakukan manajemen kerumahtanggaan, dsb.). Dari mana anda memperoleh pengetahuan mengenai cara menjalani peran kerumahtanggaan tersebut?
(a) Orang tua/anggota keluarga terdekat, (b) Masyarakat sekitar, (c) media cetak/eletronik, (d)
11. Apakah anda menjalani peran kerumahtanggaan tersebut di dalam keluarga akibat dari tuntutan:
(a) Keluarga, (b) Norma yang ada dalam masyarakat, (c)
12. Jika anda melakukan peran kerumahtanggaan anda, bagaimana perasaan anda terhadap peran tersebut?
(a) biasa saja, (b) Tidak enak, (c)
13. Jika anda merasa menjalani peran kewanitaan di lingkup pekerjaan (seperti melakukan pekerjaan yang identik dengan wanita; misalnya bekerja sebagai sekretaris, humas, kasir swalayan, penjual bunga, Dst.). Menurut anda mengapa hal tersebut dapat terjadi pada anda dan kaum anda sebagai wanita?
(a). Karena pekerjaan tersebut memang sesuai dengan sifat kewanitaan anda dan kaum wanita,

- (b). Karena dari dulu pekerjaan tersebut identik dengan wanita.
 (c). Karena dalam dunia pekerjaan, hanya pekerjaan itu yang disediakan untuk kaum wanita,
 (d)
14. Jika anda bekerja di sektor formal, dimanakah posisi anda di dalam lingkungan kerja anda?
 (a). Sebagai karyawan biasa (b) Mempunyai jabatan tertentu (c). Sebagai pengambil keputusan (d) Sebagai pimpinan (e)
15. Apakah anda di dalam bekerja merasa bisa sejajar dengan kaum pria, bahkan mampu mencapai posisi diatas kaum pria atau meraih posisi yang biasanya hanya pantas diduduki oleh kaum pria?
 (a) Jika ya, bagaimana hal itu bisa terjadi
- (b) Jika tidak, mengapa?
16. Apakah anda merasa dihambat sebagai wanita di lingkup pekerjaan anda?
 (a) Jika ya, dalam bentuk apa?
- (b) Jika tidak, mengapa hal itu bisa terjadi?
17. Apakah anda aktif sebagai anggota organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi yang bersifat politis?
 (a) Ya, nama organisasinya adalah
 sebagai.....
- (b) Tidak
18. Apakah kesempatan wanita di dalam organisasi tersebut untuk menduduki jabatan tertentu sama besarnya dengan kaum pria?
 (a) Ya, (b) Tidak.
19. Apakah ada jabatan dalam organisasi tersebut yang identik dengan kaum wanita?
 (a) Jika ya, menurut anda mengapa hal itu bisa terjadi?
- (b) Tidak
20. Apakah anda atau teman anda atau orang yang anda kenal (termasuk tokoh masyarakat), pernah berusaha untuk menuntut persamaan peran yang tidak hanya didasarkan atas perbedaan jenis kelamin?
 (a). Jika pernah, siapa? Anda atau
- (b). Tidak pernah
21. Apakah ada yang memberitahu anda bahwa bahwa kaum wanita bisa lebih dari sekedar berperan kewanitaan baik di dalam keluarga, lingkup pekerjaan ataupun dalam organisasi sosial-politik?
 (a). Jika ada, siapa atau seperti apa (bisa organisasi)?, dan dalam bentuk apa?
- (b). Tidak ada
22. Jika ada yang telah membangun kesadaran anda mengenai kesetaraan pria dan wanita seperti apa yang telah dipertanyakan di atas. Apakah yang pernah anda lakukan seterusnya untuk anda dan kaum anda sendiri?
 (a). Untuk saat ini menerima apa adanya; karena belum semua masyarakat mengerti (terutama kaum pria) bahwa pria dan wanita itu adalah setara

- (b). Saat ini menuntut kesetaraan sekalipun mendapat pertentangan baik dari kaum pria maupun dari kaum wanita yang setuju adanya ketidaksetaraan antara pria dan wanita
- ©.
23. Manakah di bawah ini yang paling aktif mendidik anda untuk berperan kewanitaan di dalam kehidupan anda pribadi/bermasyarakat?
- (a) Keluarga, (b) Masyarakat sekitar / Lingkungan pekerjaan,
(c) Lembaga pendidikan, (d).....
24. Menurut anda apakah ada produk perundang-undangan yang menyatakan pria dan wanita adalah setara dalam berperan di kehidupan masyarakat?
- (a). Jika ada, sebutkan seperti apa?
(b). Tidak ada
25. Apakah anda bangga sebagai wanita dengan segala sifat kewanitaan yang anda miliki (seperti sifat yang telah dikenal pada umumnya; lembut, penghibur, penyayang, dst.)?
- (a). Jika ya, mengapa?
(b). Jika tidak, mengapa?
26. Jika anda bangga dengan segala sifat kewanitaan yang anda miliki, apakah lalu anda bersedia mewujudkannya dalam segala peran/pekerjaan yang bersifat kewanitaan?
- (a).Jika ya, mengapa?
(b).Jika, tidak mengapa?
27. Manakah nilai-nilai politik yang ditanamkan oleh keluarga anda kepada anda?
- (a). Keadilan/Persamaan, (b) Penghapusan diskriminasi, (c) Demokrasi/HAM
(d). Kebangsaan, (e) Parpol, (f) lain-lain, sebutkan
28. Manakah nilai-nilai politik yang ditanamkan oleh lembaga pendidikan kepada anda?
- (a).Keadilan/Persamaan, (b) Penghapusan diskriminasi, (c) Demokrasi/HAM
(b).Kebangsaan, (e) Parpol, (f) lain-lain, sebutkan
29. Manakah nilai-nilai politik yang ditanamkan oleh lingkungan kerja kepada anda?
- (a). Keadilan/Persamaan, (b) Penghapusan diskriminasi, (c) Demokrasi/HAM
(d). Kebangsaan, (e) Parpol, (f) lain-lain, sebutkan
30. Manakah nilai-nilai politik yang ditanamkan oleh mass media kepada anda?
- (a). Keadilan/Persamaan, (b) Penghapusan diskriminasi, (c) Demokrasi/HAM
(b). Kebangsaan, (e) Parpol, (f) lain-lain, sebutkan
31. Apakah anda pernah mendiskusikan mengenai masalah politik di Indonesia yang berkaitan dengan keadilan, dengan sesama anggota keluarga/teman/rekan kerja?
- (a). Sering, (b) Kadang-kadang, (c) Tidak pernah
Lalu apakah anda juga pernah memperjuangkannya di kehidupan anda pribadi?
- (a). Pernah, dalam bentuk (b) Belum pernah
32. Apakah anda pernah mendiskusikan mengenai masalah politik di Indonesia yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi, dengan sesama anggota keluarga/teman/rekan kerja?
- (a). Sering, (b) Kadang-kadang, (c) Tidak pernah
Lalu apakah anda juga pernah memperjuangkannya di kehidupan anda pribadi?

- (a) Pernah , dalam bentuk (b) Belum pernah
33. Apakah anda pernah mendiskusikan mengenai masalah politik di Indonesia yang berkaitan dengan emansipasi wanita, dengan sesama anggota keluarga/teman/rekan kerja?
(a). Sering, (b). Kadang-kadang, (c) Tidak pernah
Lalu apakah anda juga pernah memperjuangkannya di kehidupan anda pribadi?
(a). Pernah , dalam bentuk (b) Belum pernah
34. Apakah anda pernah mendiskusikan mengenai masalah politik di Indonesia yang berkaitan dengan demokrasi, dengan sesama anggota keluarga/teman/rekan kerja?
(a). Sering, (b) Kadang-kadang, (c) Tidak pernah
Lalu apakah anda juga pernah memperjuangkannya di kehidupan anda pribadi?
(a). Pernah , dalam bentuk (b) Belum pernah
35. Apakah anda pernah mendiskusikan mengenai masalah politik di Indonesia yang berkaitan dengan kebangsaan, dengan sesama anggota keluarga/teman/rekan kerja?
(a). Sering, (b) Kadang-kadang, (c) Tidak pernah
Lalu apakah anda juga pernah memperjuangkannya di kehidupan anda pribadi?
(a). Pernah , dalam bentuk (b) Belum pernah
36. Apakah anda pernah mendiskusikan mengenai masalah politik di Indonesia yang berkaitan dengan HAM, dengan sesama anggota keluarga/teman/rekan kerja?
(a). Sering, (b) Kadang-kadang, (c) Tidak pernah
Lalu apakah anda juga pernah memperjuangkannya di kehidupan anda pribadi?
(a). Pernah , dalam bentuk (b) Belum pernah
37. Apakah anda pernah mendiskusikan mengenai masalah politik di Indonesia yang berkaitan dengan Parpol, dengan sesama anggota keluarga/teman/rekan kerja?
(a).Sering, (b) Kadang-kadang, (c) Tidak pernah
Lalu apakah anda juga pernah memperjuangkannya di kehidupan anda pribadi?
(a). Pernah , dalam bentuk (b) Belum pernah